

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI SISTEM PELELANGAN HASIL  
PERIKANAN TANGKAP NELAYAN PURSE SEINE DI TEMPAT  
PELELANGAN IKAN (TPI) PRIGI, KECAMATAN WATULIMO,  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**LAPORAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERIKANAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana**

Oleh  
**AHMAD ROKHANI**  
NIM. 0310840003



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2009**

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI SISTEM PELELANGAN HASIL  
PERIKANAN TANGKAP NELAYAN PURSE SEINE DI TEMPAT  
PELELANGAN IKAN (TPI) PRIGI, KECAMATAN WATULIMO,  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Oleh:  
**AHMAD ROKHANI**  
**NIM. 0310840003**

telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 16 Januari 2009 dinyatakan  
telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I

(Dr. Ir. NUDDIN HARAHAP, MP)

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

DR. Ir. PUDJI PURWANTI, MP

Tanggal :

Dosen Penguji II

(ZAINAL ABIDIN, SPi)

Tanggal :

Dosen Pembimbing li

Ir. ISMADI, MS

Tanggal :

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Ir. MAHENO SRI WIDODO, MS

Tanggal :

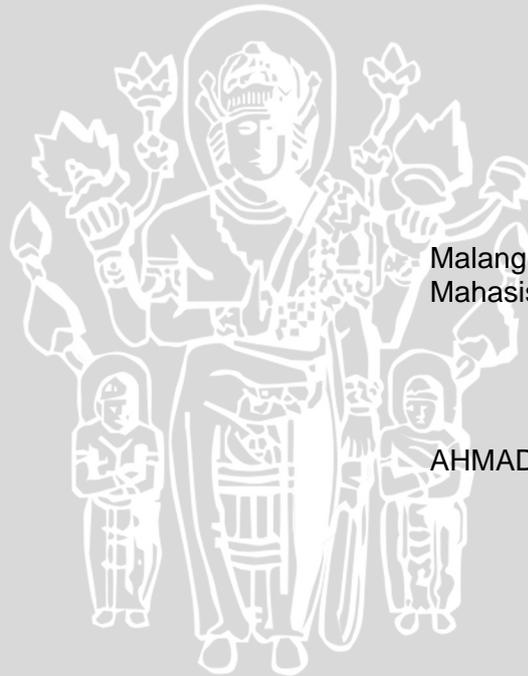
## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 16 Januari 2009  
Mahasiswa

AHMAD ROKHANI



## UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan selesainya laporan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu DR. Ir. Pudji Purwanti, Msi selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan berharga dengan sabar mulai dari proses penyusunan usulan skripsi di tengah kesibukan beliau yang sangat padat.
2. Bapak Ir. Ismadi, MS selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi hingga penulisan laporan ini.
3. Ibu (Mbok Ngatinah) dan Bapak Panidi, serta Yu Bad, Yu Mar, Yu Tun, Kang Mud dan Kang Man, yang telah memberikan amanat dan dorongan kepada penulis untuk ke Ta'lim di Malang.
4. Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi serta Nelayan dan pedagang ikan di Pantai Prigi atas waktu, bantuan dan informasinya dalam penelitian ini
5. Rekan-rekan SOSEK '03 atas diskusi dan tukar informasi, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Malang, Januari 2009

Penulis

## RINGKASAN

**AHMAD ROKHANI.** Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Sistem Pelelangan Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Purse Seine Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek (di bawah bimbingan **DR. Ir. Pudji Purwanti, MP dan Ir. Ismadi, MS**)

---

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada bulan Pebruari - Juni 2008.

Penelitian ini secara umum, bertujuan untuk melihat lebih dekat tentang sistem pelelangan hasil perikanan tangkap, khususnya nelayan purse seine di TPI Prigi. Secara khusus, beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui/ mendeskripsikan proses pelelangan yang berlangsung di TPI Prigi, tingkat efisiensi dan efektifitas sistem pelelangan ikan, serta persepsi *stake holder* terhadap sistem pelelangan yang berlangsung di tempat penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1983). Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik *purposif sampling*. Menurut Sudjana (1996), teknik ini terjadi apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Sistem pemasaran hasil perikanan tangkap nelayan purse seine di Pantai Prigi dilakukan di TPI Prigi. Sistem pemasaran tersebut meliputi : **Pra lelang** meliputi pendaratan ikan di pelabuhan, pengangkutan ikan ke TPI sampai penimbangan ikan; **Lelang** mulai dari pihak TPI mengumumkan keadaan ikan yang akan dijual serta penawaran pertama harga oleh pihak TPI sampai dengan kesepakatan harga; **Pasca lelang** meliputi pembayaran uang transaksi pelelangan, pembayaran retribusi sampai dengan pengangkutan ikan keluar dari TPI. Sistem lelang yang ditawarkan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan (lelang semu. Keadaan yang memprihatinkan dari sistem pemasaran di TPI Prigi adalah sistem keamanan terhadap hasil perikanan yang akan dilelang tidak terjamin. Banyak ikan nelayan yang diambil pihak-pihak yang tidak berhak sehingga hal ini merugikan nelayan.

**Tingkat efektifitas TPI Prigi termasuk bagus.** Tingkat efektifitas TPI Prigi adalah 76,19%, hal ini dapat diketahui dengan cara melihat dua parameter yang digunakan, yaitu kelayakan secara teknis maupun secara fungsional dari TPI Prigi. **Kelayakan Teknis (skor 19)** Tingkat kelayakan TPI Prigi secara teknis adalah termasuk bagus. Total skor/kriteria penilaian kelayakan TPI Prigi adalah 19, dalam arti secara teknis kondisi TPI Prigi termasuk kriteria 90,48% bagus (nilai total skor >14,5). Hal ini tentu saja sangat masuk akal, karena TPI Prigi termasuk satu paket pembangunannya dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang termasuk kelas B dalam standar nasional. Sedangkan tingkat kelayakan TPI Prigi secara fungsional termasuk sedang. Dari parameter yang digunakan diperoleh total nilai 13 dan ini artinya bahwa TPI Prigi 61,90% berfungsi sesuai dengan harapan atau tingkat kelayakan TPI secara fungsional termasuk sedang.

**Tingkat efisiensi** sistem pelelangan ikan di TPI Prigi bagi nelayan, pedagang, dan pihak penyelenggara TPI Prigi adalah heterogen. Nilai Margin Pemasaran (*Mark Up*) dari nelayan adalah rata-rata sebesar 1,48% dengan nilai paling tinggi ada pada KM Nabila sebesar 2,34% sedangkan yang paling rendah ada pada KM Sinar sebesar 0,56%. Sedangkan bagi pedagang, Nilai Margin Pemasaran (*Mark Up*) adalah rata-rata 1,74%. dengan nilai paling tinggi ada pada Ibu Wiji dengan nilai sebesar 2,84% sedangkan yang paling rendah ada pada Ibu Suratin dengan nilai sebesar 1,80%. Bagi pengelola TPI, sistem pelelangan di TPI Prigi kurang efisien, hal ini dikarenakan perolehan retribusi yang diterima TPI tidak sesuai dengan peraturan yang ada (5% dari total nilai transaksi yang dilakukan) yaitu sebesar Rp. 260.000.000 (seharusnya Rp. 767.426.800) dari total nilai produksi sebesar Rp.15.348.536.000 pada tahun 2007 dan pada bulan Juli 2008 sebesar Rp. 37.580.000 (seharusnya Rp. 143.638.450) dari total nilai produksi sebesar Rp. 2.872.769.000.

Bagi nelayan, fungsi TPI sebagai penyelenggara pelelangan sekaligus pengontrol stabilitas harga ikan tidak terlaksana dengan baik, pelelangan yang ditawarkan di TPI Prigi tidak berjalan secara murni. Keamanan ikan hasil tangkapan mereka yang didaratkan di TPI Prigi juga kurang terjamin, sementara TPI menuntut agar retribusi dibayarkan secara penuh. Pedagang menilai bahwa TPI Prigi belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan profesional. Sistem pelelangan yang ditawarkan di TPI Prigi tidak berjalan secara murni sehingga yang terjadi adalah mirip dengan pasar oligopsoni dimana ada kongsi-kongsi antara beberapa pedagang yang menguasai harga di TPI Prigi. Bagi penyelenggara TPI, kurang maksimalnya fungsi TPI Prigi bukanlah semata-mata karena kesalahan pihak penyelenggara *an sich*. Kurang maksimalnya fungsi TPI adalah karena kurangnya dukungan (ketertiban dan keamanan) dari *stakeholder* yang terlibat (nelayan, pedagang) dalam sistem pelelangan secara integral.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi dengan judul “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Sistem Pelelangan Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Purse Seine Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek”. Di dalam laporan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi mekanisme pelelangan hasil perikanan tangkap nelayan Purse Seine di TPI Prigi, analisis efektifitas dan efisiensi system pelelangan yang ada serta persepsi *stake holder* yang terlibat terhadap sistem pelelangan yang ada di TPI Prigi.

Sangat penulis sadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan penulis untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan sehingga saran dan masukan sangat diperlukan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan

Malang, Januari 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Arti Penting Tataniaga Perikanan.....	10
2.2.1 Bentuk pasar dan mekanisme harga barang .....	13
2.3 Tempat Pelelangan Ikan.....	20
2.3.1 Pengertian Lelang ( <i>Auction</i> ) .....	21
2.3.2 Sistem Pelelangan Ikan .....	23
2.3.3 Gedung Pelelangan Ikan .....	25
2.4 Kebudayaan Masyarakat .....	25
2.5 Alat Tangkap Purse seine.....	30
2.6 Kerangka Pemikiran .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Penentuan Lokasi .....	33
3.2 Pendekatan Studi .....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.4 Prosedur Penarikan Sampel.....	36
3.4.1 Populasi .....	36
3.4.2 Penentuan Sampel .....	36
3.5 Analisa Data .....	38
3.5.1 Analisa Proses Pelelangan Ikan .....	38
3.5.2 Analisa Efisiensi Sistem Pelelangan ikan di TPI Prigi ( <i>Performance</i> Usaha Nelayan Purse Seine, Pedagang, Instansi TPI).....	39

3.5.3	Analisa Efektivitas Sistem Pelelangan ikan di TPI Prigi.....	40
3.5.4	Analisa Persepsi <i>Stake Holder</i> Terhadap Sistem Pelelangan Yang Berlangsung .....	43
3.6	Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
<b>IV.</b>	<b>KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANG .....</b>	<b>44</b>
4.1	Letak Geografis Dan Keadaan Topografi .....	44
4.2	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk .....	45
4.3	Keadaan Umum Perikanan.....	47
4.3.1	Kegiatan Usaha Perikanan .....	47
4.3.2	Musim Penangkapan Ikan .....	49
4.3.3	Jumlah Armada Perikanan dan Jenis Alat tangkap .....	49
4.3.4	Produksi Perikanan.....	53
4.3.5	Pemasaran Ikan.....	54
4.3.6	Lembaga Perikanan.....	55
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
5.1	Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi .....	61
5.2	Proses Pelelangan Ikan.....	63
5.3	<i>Performance</i> Usaha.....	70
5.3.1	<i>Performance</i> Usaha nelayan purse seine.....	71
5.3.2	<i>Performance</i> Usaha pedagang.....	74
5.3.3	<i>Performance</i> Usaha instansi TPI .....	77
5.4	Tingkat Kelayakan TPI.....	80
5.4.1	Kelayakan Teknis.....	80
5.4.2	Kelayakan Fungsional.....	81
5.5	Persepsi dan Hubungan Antara Nelayan, Pedagang dan Pihak TPI .....	83
5.5.1	Hubungan Antara Nelayan dengan Pedagang .....	84
5.5.2	Hubungan Antara Nelayan dengan TPI .....	85
5.5.3	Hubungan Antara Pedagang dengan TPI.....	87
<b>VI.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
6.1	Kesimpulan .....	89
6.2	Saran .....	91
<b>VII.</b>	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kelautan dengan luas lautnya seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> atau 75% dari luas seluruh wilayah. Dengan jumlah pulau mencapai 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.290 km merupakan salah satu pantai yang amat panjang yang dimiliki oleh suatu negara di dunia. Indonesia dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan memiliki keanekaragaman potensi dan kekayaan, terutama sumber daya perikanan. Sekedar ilustrasi, mengutip hasil penelitian beberapa ahli perikanan bahwa potensi perikanan di Indonesia sebesar 6,26 juta ton/tahun dengan keragaman jenis ikan. Pada tahun 2005, total produksi perikanan 4,71 juta ton, dimana 75 % (3,5 juta ton) berasal dari tangkapan laut (Huseini, 2007)

Negara Indonesia yang memiliki kekayaan laut yang begitu besar, tentunya masyarakatnya terutama masyarakat nelayan akan menjadi masyarakat yang makmur. Menjadi aneh ketika kekayaan yang sedemikian besar ternyata hanya mampu mensejahterakan “elit masyarakat tertentu” (pedagang) disekitar wilayah tersebut, sedangkan nelayan tetap berada pada batas subsistensi. Nelayan seakan-akan selalu ditempatkan pada posisi “alat produksi” yang produktivitasnya diukur dengan besaran jumlah tangkapannya. Sementara sisi pemasaran seolah-olah menjadi wilayah yang hanya boleh disentuh oleh para elit tertentu saja. Hal ini diperparah lagi oleh karakteristik produk perikanan yang cepat mudah busuk (*perisable food*), rendahnya kualitas SDM, rendahnya penguasaan aset produktif serta rendahnya akseibilitas anggota masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan dan peluang-peluang ekonomi, menyebabkan nelayan selalu berada di bawah, ketika berhadapan dengan para pedagang (Darwis, 2004).

Dalam teori eksploitasi yang dikemukakan oleh Scoot dalam Susilo (1986), menyebutkan bahwa pertukaran tak seimbang maka akan memunculkan struktur makro, artinya jika dua orang/kelompok yang berbeda kelas bekerja sama, yang akan terjadi adalah tindakan eksploitasi oleh golongan atas ke golongan yang berada di bawahnya. Hal ini memang terlihat di kehidupan nelayan, dimana nelayan selalu menjadi objek dari elit pedagang. Dalam kondisi seperti ini mustahil nasib nelayan dapat ditingkatkan tanpa adanya usaha-usaha untuk memberdayakan nelayan, khususnya dalam tataniga hasil tangkapannya.

Gejala-gejala diatas telah terjadi sejak lama dan alamiah walaupun dilihat dari sudut pandang normatif menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Bentuk solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah melalui pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tujuan didirikannya TPI pada dasarnya menurut Hanafiah dan Saefudin<sup>1</sup> adalah untuk mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual ikan hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan nelayan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut ternyata belum bisa berjalan dengan optimal di seluruh Indonesia. Posisi nelayan ternyata masih lemah ketika berhadapan dengan pedagang. Pemerintah dalam penetapan kebijakan pembangunan TPI pada umumnya kurang memperhatikan sistem yang ada pada masyarakat secara integral. Sehingga proses pelelangan secara formal terlihat akan tetapi secara substansi yang terjadi adalah pasar monopsoni atau oligopsoni, yang berarti harga ikan di pasar pelelangan (TPI) ditentukan oleh pembeli.

Kabupaten Trenggalek, suatu daerah yang terletak di pantai selatan Jawa Timur memiliki kegiatan perikanan laut yang berkembang dari tahun ke

<sup>1</sup> Hanafiah dan Saefudin. *Tata niaga Hasil Perikanan*. UI-Press. Jakarta.2006.halaman 200

tahun dengan garis pantai sepanjang  $\pm$  96 km. Sebagian besar pantainya berbentuk teluk yaitu terdiri dari Teluk Panggul di Kecamatan Panggul, Teluk Munjungan di Kecamatan Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi di Kecamatan Watulimo dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 35.424 km<sup>2</sup> (Anonymuos,2006). Di daerah ini dibangun sebuah pelabuhan kelas B yang terletak di Pantai Prigi, bernama Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi). PPN Prigi juga dilengkapi dengan fasilitas pokok berupa dua Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu TPI barat (940 m<sup>2</sup>) yang dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya lebih dari 15 GT dan TPI timur (400 m<sup>2</sup>) yang dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya kurang dari 15 GT.

Menurut laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2007, volume produksi perikanan yang didaratkan di PPN Prigi sebesar 22.332 ton dengan total nilai Rp 92.259.150.000,- dengan produk ikan unggulan jenis ikan pelagis seperti ikan Tongkol como 9.998 ton, Layang 5.189 ton, Lemuru 4.502 ton, Cakalang 942 ton, Layur 686 ton, Tuna mata besar 373 ton, Slengseng 156 ton dan jenis lainnya 486 ton. Produksi hasil tangkapan tersebut sebagian besar ditangkap dengan menggunakan alat tangkap Pukat cincin yaitu sebesar 19.214 ton (86,04%). Sedangkan sisanya diproduksi dengan menggunakan alat tangkap Pancing Tonda 875 ton (3,92%), Pancing Ulur 470 ton (2,11%), Payang 1.410 ton (6,31%), Pukat Pantai 121 ton (0,54%), Jaring Insang 226 ton (1,01%), Jaring Klitik 16 ton (0,01%).

Dari kondisi diatas dapat kita peroleh informasi bahwasanya di Pantai Prigi produksi terbesar diperoleh hasil perikanan tangkap dengan menggunakan alat tangkap Purse Seine (86,04%). Menurut Sukandar (2006), Purse seine adalah merupakan dinding dari jaring tanpa kantong yang membentang antara tali ris atas dan tali ris bawah, dan apabila alat ini dilingkarkan pada gerombolan

ikan, kemudian bagian bawah jaring ditutup dengan menarik tali kolor (purse seine) melalui ring-ring, maka jaring akan berbentuk seperti bakul besar, dimana ikan-ikan akan terkurung didalamnya. Purse Seine (pukat cincin) ini memang potensial dan produktifitas hasil tangkapnya tinggi terutama untuk ikan-ikan pelagis. Hasil tangkapnya terdiri dari spesies yang dikategorikan komersial, antara lain: layang (*Decapterus sp*), lemuru (*Sardinella sp*), kembung (*Rastrelliger sp*) dan lain-lain (Atmadja dan Suherman, 1998).

### 1.2 Rumusan Masalah

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun pertama kali di Jawa Timur pada tahun 1971 di Puger (Jember) dan Panarukan (Situbondo). TPI dibangun pada Pusat-Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan pada sentra-sentra budidaya (Susilo,1986). Salah satu fungsi utama TPI adalah menyelenggarakan pemasaran/pelelangan hasil tangkapan nelayan. Dalam proses pelelangan tersebut, TPI akan mampu mengangkat daya tawar (*bargaining position*) nelayan ketika berhadapan dengan pedagang, dengan terciptanya harga dan sistem pembayaran yang layak tanpa merugikan pedagang (*win-win solution*).

TPI Prigi dibangun sejak tahun 1976, pembangunan TPI dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Propinsi Jawa Timur. Pelaksanaan TPI di Prigi Watulimo pada tahun 1976 diserahkan penyelenggaraannya kepada Koperasi Unit Desa Mina Tani Sempurna (KUD MTS) sampai tahun 2000. Pada tahun 2000 sampai tahun 2003 pengelolaan TPI Prigi dikelola oleh Koperasi Sinati dan KBN. Sinati adalah koperasi yang merupakan manifest dari para juragan/pemilik alat tangkap purse seine, sedangkan KBN adalah Koperasi Bakul Nelayan. Mulai tahun 2003 sampai sekarang TPI Prigi dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Trenggalek. Adapun fungsi dari TPI Prigi diantaranya : Menjamin kelestarian sumberdaya alam, Mengembangkan

potensi ekonomi masyarakat, Memberdayakan kapasitas dan partisipasi masyarakat nelayan.

Pengelolaan TPI Prigi yang berganti dari waktu ke waktu menimbulkan berbagai pertanyaan masyarakat umum, mengingat pengelola dari masing-masing periode adalah merupakan representasi dari kelompok tertentu. Walaupun begitu, *bargaining position* nelayan tetap saja lemah dihadapan pedagang dalam melakukan pelelangan di TPI. Penentuan harga seakan-akan masih berada pada sekelompok pedagang saja sehingga dalam pemasaran/pelelangan tersebut terjadi ketimpangan. Salah satu indikasi ketimpangan paling jelas adalah adanya polarisasi kesejahteraan antara nelayan dan pedagang/tengkulak.

Kondisi-kondisi diatas diperparah lagi oleh karakteristik yang dimiliki oleh produk-produk perikanan khususnya perikanan tangkap. Diantaranya mudah rusak (*perisable*), dan juga jumlah yang cenderung labil stoknya karena dipengaruhi oleh musim, sedangkan jumlah pedagang/tengkulak umumnya stabil. Kondisi semacam ini memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk berusaha menguasai nelayan dengan menguasai pasar ketika proses pelelangan berlangsung.

Dalam menyikapi berbagai fenomena-fenomena umum diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut tentang sistem pelelangan hasil perikanan tangkap nelayan purse seine di TPI Prigi yang meliputi :

1. Bagaimana sistem pelelangan yang berlangsung di TPI Prigi?
2. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas sistem pelelangan ikan di TPI Prigi?
3. Bagaimana persepsi *stake holder* terhadap sistem pelelangan yang berlangsung?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum, bertujuan untuk melihat lebih dekat tentang sistem pelelangan hasil perikanan tangkap, khususnya nelayan purse seine di TPI Prigi. Secara khusus, beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui/ mendeskripsikan :

1. Proses pelelangan yang berlangsung di TPI Prigi.
2. Tingkat efisiensi dan efektifitas sistem pelelangan ikan.
3. Persepsi *stake holder* terhadap sistem pelelangan yang berlangsung.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi :

1. Pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Trenggalek memberikan informasi dan masukan tentang arah dan pola pembinaan pelelangan ikan di daerah TPI Prigi.
2. Masyarakat nelayan, pedagang, maupun pihak terkait sebagai informasi tentang sistem tata niaga/pelelangan yang ada di TPI Prigi.
3. Akademisi sebagai salah satu bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anonymuos, 2006. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2005. Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek. 60 hal
2. Atmadja, Suherman B. 1998. Estimation of Growth and Mortality of Round Scad (*Decapterus macrosoma*) in the Java Sea, Indonesia. Research Institute for Marine fisheries Sunda Kelapa. Jakarta
3. Darwis, V. 2004. Faktor Penyebab Kemiskinan, Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga miskin Lahan Pesisir di Kabupaten Lamongan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. 15 hal.
4. Hanafiah, A.M dan A.M Saefudin. 2006. Tataniaga Hasil Perikanan. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta 208 hal.
5. Susilo, E. 1986. Nelayan, di Antara tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan Suatu Analisa teoritik. Makalah pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial di Ujung Pandang, 15-19 Desember 1986. 21 hal.
6. Sukandar. 2006. Diktat Manajemen Penangkapan Ikan. Fakultas Peikanan. Universitas Brawijaya. Malang. 39 hal.
7. Indrawadi, 2002. Nasib nelayan dan Kelautan. Penebar Swadaya. Jakarta



Tujuan	Hasil dan Pembahasan	Kesimpulan	Saran
<p>1. Proses pelelangan yang berlangsung di TPI Prigi</p> <p>2. Tingkat efisiensi dan efektifitas sistem pelelangan ikan.</p> <p>3. Persepsi <i>stake holder</i> terhadap sistem pelelangan yang berlangsung</p>		<p>1. Sistem pemasaran hasil perikanan tangkap nelayan purse seine di Pantai Prigi dilakukan di TPI Prigi. Sistem pemasaran tersebut meliputi kegiatan Pra lelang, lelang dan pasca lelang. Pra lelang meliputi pendaratan ikan di pelabuhan, pengangkutan ikan ke TPI sampai penimbangan ikan. Kegiatan lelang mulai dari pihak TPI mengumumkan keadaan ikan yang akan dijual serta penawaran pertama harga oleh pihak TPI sampai dengan kesepakatan harga. Sedangkan pasca lelang meliputi pembayaran uang transaksi pelelangan, pembayaran retribusi sampai dengan pengangkutan ikan keluar dari TPI. Keadaan yang memprihatinkan dari sistem pemasaran di TPI Prigi adalah sistem keamanan terhadap hasil perikanan yang akan dilelang serta proses pelelangan yang kurang transparan (lelang semu).</p> <p>2. Tingkat efisiensi sistem pelelangan ikan di TPI Prigi</p>	<p>1. Terhadap pengelola TPI Prigi perlu adanya peningkatan pengelolaan sistem pelelangan secara profesional yang meliputi pra pelelangan, proses pelelangan dan pasca pelelangan sehingga fungsi penyelenggaraan TPI dapat berjalan semaksimal mungkin.</p> <p>2. Perlu adanya forum bersama antara nelayan, pedagang dan pengelola TPI tentang bagaimana manfaat dan fungsi TPI bagi rantai pemasaran hasil perikanan serta langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kesepakatan yang ada dari forum tersebut sehingga persepsi negatif dan rasa saling curiga akan tereduksi.</p> <p>3. Perlu adanya kredit lunak dan mudah prosesnya yang disediakan kepada nelayan guna mengurangi ketergantungan mereka kepada pedagang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan usaha mereka.</p> <p>Perlu adanya peningkatan</p>

		<p>bagi nelayan, pedagang, dan pihak penyelenggara TPI Prigi adalah heterogen. <i>Marketing efficienci</i> dari nelayan adalah rata-rata sebesar 62,05% yang berarti sistem pelelangan di TPI Prigi kurang efisien bagi nelayan (karena &gt; 50%) dengan nilai paling tinggi ada pada KM Sinar sebesar 134,94% sedangkan yang paling rendah ada pada KM Mina Jaya sebesar 31,75%. Sedangkan bagi pedagang, tingkat efisiensi system pelelangan di TPI Prigi adalah rata-rata 56,40%. dengan nilai paling tinggi ada pada Ibu Suratin dengan nilai sebesar 71,43% sedangkan yang paling rendah ada pada Bapak Dadang dengan nilai sebesar 35,00%. Bagi pengelola TPI, sistem pelelangan di TPI Prigi kurang efisien, hal ini dikarenakan perolehan retribusi yang diterima TPI tidak sesuai dengan peraturan yang ada (5% dari total nilai transaksi yang dilakukan) yaitu sebesar Rp. 260.000.000 (seharusnya Rp. 767.426.800) dari total nilai produksi</p>	<p>SDM dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pesisir agar lebih mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada</p>
--	---	--	--

		<p>sebesar Rp.15.348.536.000 pada tahun 2007 dan pada bulan Juli 2008 sebesar Rp. 37.580.000 (seharusnya Rp. 143.638.450) dari total nilai produksi sebesar Rp. 2.872.769.000.</p> <p>3. Persepsi nelayan, pedagang, maupun pengelola TPI sendiri terhadap fungsi TPI kurang memuaskan. Bagi nelayan, fungsi TPI sebagai penyelenggara pelelangan sekaligus pengontrol stabilitas harga ikan tidak terlaksana dengan baik, bahkan keamanan ikan hasil tangkapan mereka yang didaratkan di TPI Prigi juga kurang terjamin, sementara TPI menuntut agar retribusi dibayarkan secara penuh. Sedangkan pedagang menilai bahwa TPI Prigi belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan profesional. Sistem pelelangan yang ditawarkan di TPI Prigi tidak berjalan secara murni sehingga yang terjadi adalah mirip dengan pasar oligopsono dimana ada kongsi-kongsi antara beberapa pedagang</p>	
--	---	--	--



yang menguasai harga di TPI Prigi. Bagi penyelenggara TPI, kurang maksimalnya fungsi TPI Prigi bukanlah semata-mata karena kesalahan pihak penyelenggara *an sich*. Kurang maksimalnya fungsi TPI adalah karena kurangnya dukungan dari *stakeholder* yang terlibat dalam sistem pelelangan secara integral.

4. Hubungan antara nelayan dan pedagang adalah merupakan hubungan partner kerja, walaupun apabila dilihat lebih detail ada semacam hubungan *patron-client*. Secara umum, usaha pedagang untuk mengikat nelayan agar mereka mau dan tetap menjual ikan hasil tangkapannya adalah dengan cara memberikan perhatian kepada nelayan dalam bentuk memberikan pinjaman kepada nelayan, baik berupa pinjaman untuk biaya operasional penangkapan maupun untuk biaya kehidupan sehari-hari. Hubungan antara nelayan, pedagang dengan TPI adalah kurang harmonis. Menurut nelayan dan pedagang, pihak

		<p>TPI kurang profesional dalam menjalankan fungsinya serta kurang transparan dalam pengelolaan retribusi yang diterima, di lain sisi mereka menuntut untuk dibayarkan secara penuh retribusi sebesar 5%.</p> <p>Tingkat kelayakan TPI Prigi secara teknis adalah termasuk bagus. Total skor/kriteria penilaian kelayakan TPI Prigi adalah 19, dalam arti secara teknis kondisi TPI Prigi termasuk kriteria 90,48% bagus (nilai total skor &gt;14,5). Hal ini tentu saja sangat masuk akal, karena TPI Prigi termasuk satu paket pembangunannya dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang termasuk kelas B dalam standar nasional. Sedangkan tingkat kelayakan TPI Prigi secara fungsional termasuk sedang. Analisis tingkat kelayakan TPI Prigi secara fungsional dengan menggunakan parameter antara lain : penyediaan sarana, penyediaan data-data statistik perikanan, pembinaan mutu hasil perikanan, sistem dan kelayakan pembentukan</p>	
--	---	---	--

	<p>harga dan fungsi TPI sebagai sumber PAD. Dari parameter tersebut dapat diperoleh total nilai 13 dan ini artinya bahwa TPI Prigi 61,90% berfungsi sesuai dengan harapan atau tingkat kelayakan TPI secara fungsional termasuk sedan</p>	
--	---	--

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Kusnadi (2004) menyatakan bahwa kemiskinan nelayan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya beliau merinci bahwa faktor internal tersebut antara lain (1) rendahnya sumber daya manusia (SDM) nelayan, (2) keterbatasan kemampuan modal dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja yang kurang menguntungkan, (4) kesulitan diversifikasi usaha, (5) ketergantungan terhadap laut, (6) gaya hidup yang dipandang boros. Sedangkan faktor eksternal antara lain (1) kebijakan yang kurang komprehensif, (2) sistem pemasaran yang lebih menguntungkan pedagang, (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut, (4) penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah, (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca tangkap, (7) terbatasnya peluang usaha diluar sektor perikanan, (8) kondisi alam yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Bersama Kusnadi, peneliti lain, seperti Edi Susilo, Sutawi, David Hermawan dan Bagong Suyanto telah melakukan “perang pena” yang cukup menarik di harian Kompas mengenai polemik kemiskinan nelayan<sup>1</sup>. Mereka sepakat bahwa kemiskinan yang dialami nelayan bagaikan penyakit yang kompleks, sehingga untuk mengatasinya tidaklah mungkin hanya diselesaikan lewat satu-dua program, baik itu dalam bentuk stimulan bantuan modal usaha, pemberdayaan untuk penguatan kelembagaan lokal, maupun program pemberdayaan lain yang selama ini cenderung bersifat parsial dan tidak menyentuh esensi masalah.

---

<sup>1</sup> Keseluruhan artikel tersebut dikumpulkan dalam satu buku, *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Pondok Edukasi & Pokja Pembaruan. Bantul.2004

Salah satu pokok dalam usaha untuk mengentaskan jerat kemiskinan nelayan adalah dengan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) nelayan, baik dimata pemilik armada, pedagang/tengkulak, maupun dimata pemerintah. Dengan peningkatan *bargaining* tersebut, maka menjadi kecil kemungkinan nelayan akan dilecehkan ataupun diperdayai, khususnya mengenai harga hasil tangkapannya. Selanjutnya perlu dipikirkan bagaimana strategi untuk meningkatkan *bergaining* nelayan tersebut.

Menurut Susilo (1986), bahwa dalam arti luas perikanan adalah bagian pertanian, sehingga beliau mengandaikan hubungan antara nelayan dengan pedagang/tengkulak mirip dengan hubungan tuan tanah dengan penyewa yang dikemukakan oleh Scott. Hal senada juga dibenarkan oleh Setiawan dkk (1993), sehingga ketika hubungan tersebut lebih kuat sebelah, maka cenderung terjadi eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah.

Hubungan yang terjadi antara nelayan dan tengkulak diawali ketika nelayan melakukan penjualan hasil tangkapannya ke tengkulak, sehingga berlanjut nelayan meminjam sejumlah uang kepada tengkulak dan berlanjut hingga piutang tengkulak tersebut sebagai pengikat hubungan antara kedua belah pihak. Berikut adalah penggambaran hipotesis fase-fase tata hubungan yang menunjukkan peningkatan ketergantungan nelayan pada tengkulak/pedagang ikan (Susilo, 1986).

Fase I : Kondisi kehidupan nelayan penuh “ketidakpastian” perolehan hasil tangkap mengidentikan mereka pada suatu posisi siap untuk “dimangsa” oleh tengkulak. Semakin lama terdapat peningkatan ketergantungan nelayan kepada tegkulak.

Fase II : Suatu ketergantungan tingkat awal, pedagang ikan mendapat peluang untuk melakukan perjanjian-perjanjian jual beli yang adil. Agar nelayan merasakan itu sebagai adil, perjanjiannya

masih memerlukan persetujuan dari nelayan. Pada fase ini, nelayan masih merasakan bahwa kehadiran pedagang ikan memang diperlukan.

Fase III : Karena nelayan tidak merasa dieksploitasi, maka pedagang ikan semakin leluasa untuk melakukan perjanjian jual-beli semakin lebih tidak adil, atau ia berusaha supaya tidak terjadi pelunasan pinjaman. Keadaan ini menyebabkan nelayan berada pada tingkat ketergantungan lebih tinggi. Pada fase ini justru nelayan enggan untuk memutuskan hubungan, suatu keadaan tercipta bagi pedagang ikan untuk memperkokoh posisinya. Kedudukan pedagang ikan yang diperkokoh itu memungkinkan eksploitasi lebih mendalam. Walaupun nelayan sebenarnya merasakan ketidakadilan tersebut, tetapi ia sudah tidak kuasa untuk menghindar.

Fase IV : Pedagang ikan dapat dengan mudah melakukan perjanjian-perjanjian tanpa harus melalui persetujuan dari nelayan. Nelayan harus tunduk pada kekuasaan itu, dan ia akan memenuhi hampir segala permintaan pedagang ikan, termasuk permintaan hanya menjual ikan atau meminjam uang hanya kepada pedagang ikan bersangkutan.

Menurut Engineer (2007), Ajaran agama islam juga memperhatikan masalah keadilan dalam perdagangan (*tijarah*). Islam lahir dalam lingkungan tataniaga/perdagangan Makah dan karena itu di dalam konteks sosial-ekonomi, ia menekankan kebaikan-kebaikan perdagangan (*tijarah*) dan kemudian menempatkan posisi seorang pedagang yang jujur setelah nabi dan *syuhada* yang mati dijalan Allah. Pada saat yang sama ia menghukum berat para pedagang dan saudagar-saudagar yang melakukan praktik tidak jujur dan

berusaha memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil. Transaksi apa pun yang berkaitan baik dengan masalah produksi maupun perdagangan, harus dilakukan dengan adil dan bebas dari eksploitasi.

Allah Berfirman dalam Al-qur'an :

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”<sup>2</sup>.

Bila kita melihat uraian diatas, maka kita seakan-akan menganggap bahwa tengkulak/pedagang ikan ibarat “setan desa”-nya nelayan. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya disetujui para peneliti. Kusnadi (2003) dan Muhamad (2006), menyatakan bahwasanya peran tengkulak tidak selalu negatif. Mereka memandang berbeda dengan peneliti kebanyakan dalam melihat peran tengkulak. Bahkan, Kusnadi menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, tengkulak justru harus dipandang sebagai roda penggerak perekonomian desa-desa nelayan.

Tanggapan pemerintah dalam melihat realitas diatas adalah dengan membangun TPI di pusat-pusat pendaratan ikan. Dengan dibangunnya TPI tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *bargaining* nelayan dalam penentuan harga hasil tangkapan.

## 2.2 Arti Penting Tataniaga Perikanan

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), Tataniaga adalah kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan atau penambahan kegunaan daripada barang dan jasa. Maka yang dimaksud tataniaga perikanan adalah kegiatan yang

---

<sup>2</sup> QS. Al-Muthafifin (83) : 1-6

berkaitan dengan penciptaan atau penambahan kegunaan daripada barang dan jasa di bidang perikanan.

Kegunaan yang diciptakan oleh kegiatan tataniaga adalah kegunaan waktu, tempat dan kegunaan pemilikan. Kegunaan waktu, berarti bahwa barang-barang mempunyai faedah (yang lebih besar) setelah terjadi perubahan waktu. Misalnya ikan tongkol pada waktu bukan musimnya lebih besar keuntungannya dibandingkan pada waktu musimnya. Kegunaan tempat berarti barang-barang tersebut mempunyai kegunaan lebih besar karena perubahan tempat. Misalnya ikan tongkol di tengah laut akan mempunyai kegunaan lebih besar bila dibawa ke daratan/pantai. Kegunaan pemilikan berarti bahwa-barang tersebut mempunyai kegunaan lebih besar karena perubahan kepemilikannya. Berdasarkan uraian diatas, maka tataniaga pada dasarnya adalah tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan bergeraknya barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

Di dalam masalah pemasaran hasil-hasil perikanan terdapat hubungan yang sangat erat antara kegiatan produksi dan pengolahan hasil perikanan, dimana satu dengan yang lainnya berpengaruh. Pemasaran hasil perikanan yang lancar dan baik merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan kegiatan produksi hasil perikanan atau merupakan salah satu faktor penunjang di dalam mengembangkan bidang perikanan walaupun menurut kenyataan kenaikan hasil produksi belum tentu membawa manfaat atau keuntungan bagi pihak produsen (nelayan) bila tidak ditunjang oleh pemasaran yang baik.

Barang-barang hasil perikanan baik yang berasal dari perairan laut maupun perairan darat, dapat digolongkan ke dalam :

1. barang-barang konsumsi,
2. bahan-bahan.

Barang-barang konsumsi adalah produk perikanan yang langsung dipergunakan oleh konsumen akhir dalam bentuk yang sama seperti sewaktu meninggalkan bidang perikanan. Bahan-bahan adalah produk perikanan yang dipergunakan oleh pabrik atau pengolah untuk dijadikan atau menghasilkan barang baru.

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), produk perikanan mempunyai ciri-ciri yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan masalah dalam tataniaganya. Ciri-ciri tersebut antara lain :

1. Produksi perikanan berlangsung secara musiman, sehingga panennya terbatas dalam periode tertentu yang relatif singkat dan di daerah yang terpencar-pencar sehingga mengakibatkan beban musiman (*peak load*).
2. Konsumsi hasil perikanan berupa bahan makanan yang relatif stabil sepanjang tahun. Sifat demikian ini dihubungkan dengan sifat produksinya yang musiman dan jumlahnya tidak berketentuan karena pengaruh cuaca, menimbulkan masalah dalam penyimpanan dan pembiayaan.
3. Barang-barang hasil perikanan berupa bahan makanan yang mempunyai sifat cepat atau mudah busuk (*perisable food*). Barang-barang hasil perikanan adalah organisme hidup dan karenanya cepat mudah busuk karena diakibatkan aktivitas bakteri, enzimatik dan oksidasi. Masalah ini memerlukan perawatan khusus dalam proses tataniaganya guna mempertahankan mutu.
4. Jumlah atau kualitas hasil perikanan dapat berubah-ubah menyebabkan timbulnya fluktuasi harga yang besar sebagai akibat dari perubahan kondisi penawaran dan variasi yang besar dalam kualitas cenderung mengakibatkan tidak terorganisirnya pasar, hal ini menyebabkan



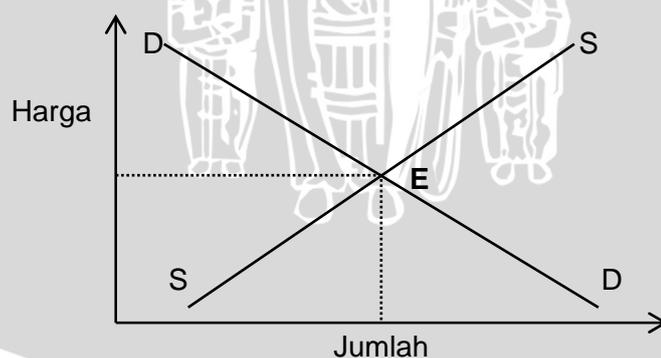
perubahan dalam harga menambah ongkos dalam penyimpanan, dan sukar di dalam grading.

Keempat hal diatas sangat berpengaruh dalam penentuan harga hasil perikanan, walaupun ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi.

### 2.2.1 Bentuk Pasar dan Mekanisme Harga Barang

Situasi pasar untuk berbagai jenis barang pada dasarnya berkisar antara lain : persaingan murni (persaingan sempurna), monopoli/monopsoni, persaingan monopolistik, dan oligopoli/oligopsoni. Proses terbentuknya harga di pasar ada beberapa macam, antara lain : ditetapkan pemerintah, ada yang ditetapkan oleh pemegang monopoli, sehingga tidak melalui tawar-menawar, tetapi ada pula yang terbentuk berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Harga yang diperoleh dari proses tawar-menawar inilah yang disebut dengan harga keseimbangan (Hanafiah dan Saefudin, 2006).

Secara sederhana dapat digambarkan proses terjadinya harga keseimbangan sebagai akibat perpotongan kurva permintaan dan penawaran adalah :



Gambar 1. Kurva Harga keseimbangan

Dalam gambar diatas bahwa harga barang terjadi pada titik **E** akibat perpotongan kurva permintaan (D) dan Penawaran (S). Apabila harga diatas harga keseimbangan (**E**), maka jumlah harga yang ditawarkan lebih besar daripada barang yang diminta, barang-barang tidak laku atau menumpuk

sehingga terpaksa diturunkan oleh penjual. Sebaliknya kalau suatu harga berada dibawah harga keseimbangan, maka jumlah barang yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan, sehingga pembeli saling berebut, persediaan barang menipis dan harga akan naik lagi.

Bila harga keseimbangan yang berlaku di pasar, dipandang oleh pemerintah dinilai terlalu tinggi, sehingga masyarakat sebagai konsumen dirugikan, maka untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum. Sebaliknya, bila harga keseimbangan yang berlaku di pasar dinilai terlalu rendah, sehingga merugikan produsen, maka untuk melindungi produsen, pemerintah dapat menetapkan harga minimum.

Berikut ini beberapa jenis pasar barang yang berhubungan dengan proses terbentuknya harga :

#### 1. Pasar Persaingan Sempurna

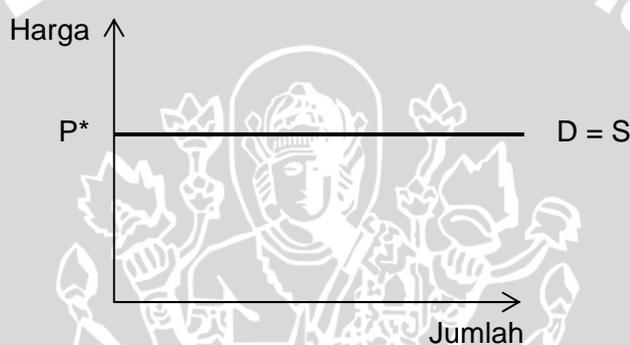
Suatu pasar dikatakan pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar jika mempunyai sifat atau syarat :

- Pada pasar tersebut berbagai perusahaan/usaha menjual produk tunggal yang identik/homogen;
- Jumlah penjual dan pembeli demikian banyaknya sehingga tidak seorangpun diantara mereka dapat mempengaruhi harga produk secara berarti;
- Penjual dan pembeli leluasa dalam mengambil keputusan-keputusannya; tidak ada perjanjian antara satu dengan yang lain.

Dalam keadaan persaingan sempurna, harga suatu macam barang ditentukan oleh penawaran total daripada semua penjual dan permintaan total daripada pembeli. Seorang penjual individual tidak dapat menentukan harga untuk produknya, karena setiap penjual didominasi seluruhnya oleh

penjual/perusahaan saingannya. Bila seorang penjual individual menaikkan harga untuk produknya maka para pembeli beralih untuk membeli produk yang dihasilkan perusahaan lain (pesaing dari penjual tersebut). Hal ini mengandung arti bahwa penjual individual dapat memperoleh harga yang sama untuk produknya, tidak peduli jumlah yang hendak dijualnya. Jadi, seorang petani/nelayan yang menghasilkan ikan tertentu dapat memperoleh harga yang sama perkuintal untuk setiap jumlah dari jenis ikan itu yang ingin dijualnya.

Secara sederhana proses terbentuknya harga pada pasar persaingan sempurna dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Kurva Harga pada pada pasar persaingan sempurna

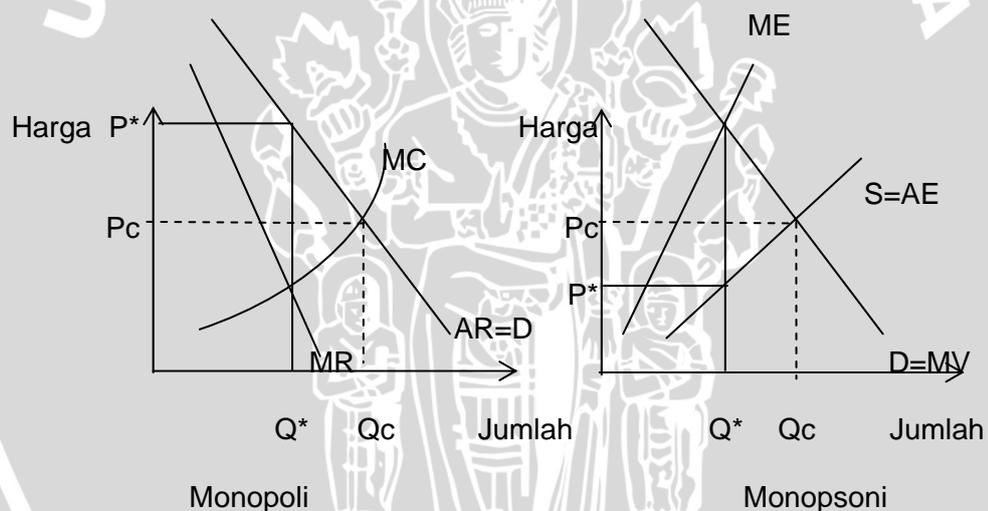
Dalam pasar persaingan sempurna, harga sudah terbentuk di pasar. Jadi penjual dan pembeli hanya menerima saja harga yang terjadi di pasar tersebut, sebab penjual dan pembeli secara individual tidak mempunyai kekuatan untuk membentuk harga dengan jalan mempengaruhi pasar. Hal ini disebabkan karena di pasar tersebut banyak penjual barang sejenis. Kalau salah seorang penjual menaikkan harga, maka pembeli akan beralih pada penjual lain. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahawa kurva permintaan dan penawaran berimpit satu dengan yang lain.

## 2. Pasar Bukan Persaingan Sempurna

### - Pasar Monopoli/ Monopsoni

Pasar monopoli dalam arti secara umum adalah situasi pasar dimana seorang atau sekelompok penjual mempunyai pengaruh demikian besar atas penawaran produk tertentu, sehingga dapat menentukan harga (Hanafiah dan Saefudin, 2006). Sedangkan menurut Pindyck (2000), monopsoni adalah digunakan untuk menyebutkan kondisi pasar dimana hanya ada satu pembeli, sehingga pembeli tersebut memiliki *monopsony power* –kekuatan pembeli untuk mempengaruhi/menentukan harga barang.

Harga yang terjadi/terbentuk pada pasar monopoli dan monopsoni secara sederhana menurut Pindyck (2000)<sup>3</sup> dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3. Kurva Harga pada pada pasar monopoli dan monopsoni**

Keterangan :	$P^*$	= harga yang terbentuk
	$P_c$	= harga pada pasar persaingan sempurna
	$Q_c$	= produk yang terjual pada pasar persaingan sempurna
	$Q^*$	= produk yang terjual
	MR	= marginal revenue
	MC	= marginal cost
	AR	= average revenue
	S	= supply
	ME	= marginal expenditure

<sup>3</sup>Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Third Edition : Microeconomic*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2000, page 348.

AE = average expenditure  
MV = marginal value  
D = demand

Pada pasar monopoli, MR berada di bawah  $AR=D$ , ketika MC berpotongan dengan MR berarti produk yang dikehendaki pasar adalah sejumlah  $Q^*$ , sehingga harga yang terbentuk adalah  $P^*$  lebih tinggi daripada harga pada persaingan sempurna ( $P_c$ ). Sedangkan pada pasar monopsoni, pembelian produk terjadi pada harga dibawah  $MV/D$  karena  $AE/S$  cenderung naik, sehingga ME lebih tinggi dari pada AE. Perpotongan antara MV dan ME sebagai acuan berapa produk yang dikehendaki pasar ( $Q^*$ ) sehingga harga yang terbentuk ( $P^*$ ) adalah dibawah harga pasar pada persaingan sempurna ( $P_c$ )

#### - Pasar Oligopoli/Oligopsoni

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), Oligopoli adalah bentuk pasar dimana terdapat lebih dari dua penjual (tetapi sedikit jumlahnya, misalnya tiga, empat penjual) produk tertentu, dan karenanya setiap perusahaan dapat mempengaruhi penjualan pihak saingannya dengan jumlah yang berarti. Sedangkan pasar oligopsoni kebalikan dari pasar oligopoli; pada pasar oligopsoni terdapat pihak pembeli benda tertentu dalam jumlah sedikit, misalnya tiga atau empat pembeli.

Pada pasar oligopoli mekanisme terbentuknya harga pada dasarnya sama seperti pada pasar monopoli, begitu juga pada pasar oligopsoni mekanisme terbentuknya harga pada dasarnya sama seperti mekanisme terbentuknya harga pada pasar monopsoni, tetapi kekuatan (*monopsony and monopoli power*) untuk mempengaruhi harga yang terbentuk tidak sekuat pada pasar monopoli maupun monopsoni. Pasar bentuk oligopoli dan oligopsoni umum dijumpai pada pemasaran hasil perikanan di Indonesia.

#### - Campur Tangan Pemerintah

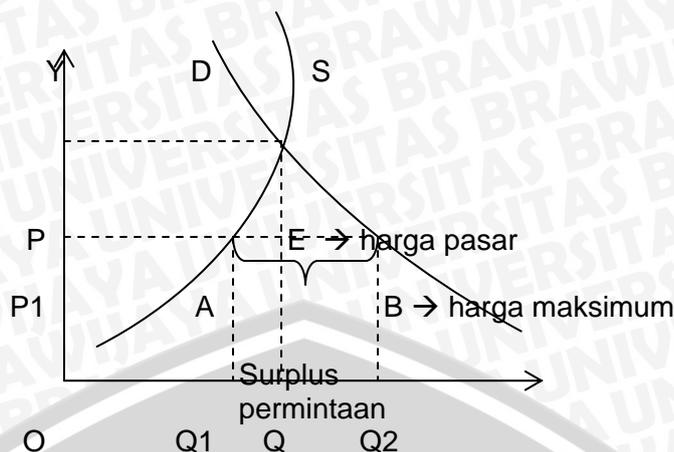
Sesuai dengan Pancasila sila ke-5, Republik Indonesia berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, diperjelas dan dikuatkan lagi dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 33 UUD 1945, pemerintah berusaha campur tangan dalam kehidupan ekonomi, dengan maksud melindungi kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan alasan-alasan tersebut pemerintah dapat melakukan campur tangan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan harga. Jika pemerintah mendapat alasan untuk turut campur tangan dalam pembentukan harga, maka harga itu tidak lagi terbentuk lagi di pasar, melainkan terbentuk di luar pasar, yaitu atas dasar campur tangan/keputusan pemerintah. Sudah tentu harga yang ditetapkan pemerintah berlainan dengan harga pasar.

Dalam hal itu campur tangan pemerintah dapat berbentuk sebagai berikut :

#### b. Harga Maksimum

Harga maksimum yaitu harga yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah kenaikan harga pasar. Para pedagang/produsen bebas menjual barangnya dengan harga dibawah harga penetapan pemerintah, tetapi dilarang menjual dengan harga diatas harga penetapan.

Penetapan harga maksimum ini pada umumnya berlaku bagi barang-barang kebutuhan pokok seperti gula, minyak, semen dan sebagainya supaya para konsumen yang kurang mampu terjamin kebutuhan pokoknya dengan harga yang layak. Harga maksimum itu untuk melindungi konsumen.

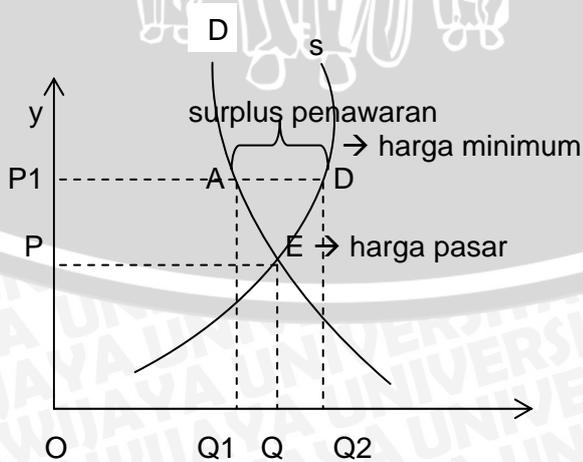


**Gambar 4. Kurva Harga maksimum yang ditetapkan pemerintah**

Pada titik E merupakan harga pasar karena merupakan perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Sedangkan harga maksimum yang ditetapkan pemerintah berada di bawah harga pasar, sehingga akibatnya terjadi surplus permintaan sebesar AEB.

**c. Harga Minimum**

Harga minimum yaitu harga yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah turunnya harga. Para produsen bebas menjual barangnya dengan harga lebih tinggi daripada harga minimum. Jika harga turun, maka produsen akan menderita kerugian, sedangkan pemerintah memandang perlu produksi berjalan terus. Tujuan utama penetapan harga minimum ini dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil.



**Gambar 5. Kurva Harga minimum yang ditetapkan pemerintah**



Perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran adalah titik E merupakan harga pasar sedangkan harga minimum yang ditetapkan pemerintah berada di atas harga pasar, sehingga terjadi surplus penawaran yaitu AED

Dalam tataniaga/pemasaran, haruslah mempertimbangkan faktor efisiensi. Bila efisiensi ini tidak diperhatikan dengan seksama, maka yang diperoleh adalah kerugian, bukan keuntungan. Pengertian efisiensi tataniaga bagi pihak konsumen berbeda dengan pengertian efisiensi tataniga bagi pihak produsen. Walaupun begitu, ada benang merah yang menghubungkan keduanya, yaitu sama-sama menginginkan keuntungan yang lebih.

Bagi produsen, yang dimaksud efisien adalah apabila penjualan produknya dapat mendatangkan pendapatan/keuntungan tinggi baginya. Sebaliknya konsumen menganggap sistem tataniaga efisien apabila konsumen mudah mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga rendah.

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), untuk menghitung efisiensi pemasaran, maka *marketing margin* sering dipakai sebagai alat ukur dengan rumus :

$$\text{Marketing Margin} = \frac{P_s - P_b}{V}$$

Keterangan :

- P<sub>s</sub> : Nilai penjualan
- P<sub>b</sub> : Nilai pembelian
- V : Volume barang dagangan

### 2. 3 Tempat Pelelangan Ikan

Menurut UU No 31/2004 tentang perikanan, pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Sedangkan menurut Rencana Strategis (RENSTRA) Dep. KP 2005-2009 untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, ada beberapa kegiatan

pokok yang akan dilakukan, antara lain pengembangan sarana dan prasarana perikanan, pengembangan sistem rantai dingin hasil laut dan ikan, intensifikasi pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sentra pelayanan terpadu nelayan dan pengembangan pasar ikan higienis. Dengan langkah-langkah strategis tersebut di harapkan tingkat kemakmuran nelayan tidak tertinggal oleh para pedagang.

Menurut Susilo (1986), TPI dibangun pertama kali di Jawa Timur pada tahun 1971 di Puger (Jember) dan di Panarukan (Probolinggo). Sejak dibangunnya TPI sampai hari ini, ternyata peran TPI kurang memuaskan harapan nelayan. Setiawan dkk (1993) menyatakan bahwa peran TPI di Pacitan tidak sesuai dengan harapan yang diimpikan. Harga ikan tidak berdasarkan pada mekanisme pasar, tetapi berdasar pada tengkulak. Hal yang sama juga terjadi di TPI Bulu kabupaten Tuban, (Pablo, 2006), bahkan menurut Susilowati dkk (1987), pada tahun 1983 hanya 0,44% nelayan yang menjual hasil tangkapannya di TPI dan selebihnya banyak yang yang menjual hasil tangkapannya pada tengkulak.

Fungsi/peranan TPI secara umum dalam suatu wilayah/lokasi pangkalan pendaratan ikan adalah sebagai : Pusat pendaratan ikan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengumpulan data statistik perikanan, pengembangan kegiatan nelayan dalam pemasaran hasil produksinya, pertemuan penawaran dan permintaan ikan, pembinaan kesejahteraan nelayan serta peningkatan pendapatan daerah (Kep. Bupati Trenggalek No. 61 tahun 2003 Tentang penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek).

### **2.3.1 Pengertian Lelang (*Auction*)**

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan

harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat, (*Kep. Men. Keu RI. No.337/KMK.01/2000 Bab.I, Ps.1*). Lebih jelasnya lelang menurut pengertian tersebut adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut lelang naik yang biasa dilakukan di Pegadaian konvensional.

Disamping itu lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas / kondisi barang, daya tarik atau animo pembeli pada produk lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham dibursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan .

Pasar lelang (*action market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat

menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*), di Pegadaian konvensional kita sebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran *cincai* (*collusive bidding*). Pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk mencegah permainan curang antara penjual lelang (kuasa penjual) dan pembeli yang akan merugikan pemilik barang / nasabah.

### 2.3.2 Sistem Pelelangan Ikan

Jika kita perhatikan dengan seksama, diri kita terdiri dari berbagai sistem untuk mengantar kita kepada tujuan hidup kita. Setiap sistem terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Menurut Mulyadi (2001) :

“suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”<sup>4</sup>.

Pendekatan sistem memberikan banyak manfaat dalam memahami lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dipandang dari sudut pandangan sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur yang

<sup>4</sup>Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, halaman 2

membentuk sistem tersebut dan mengidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dalam aspek pelelangan, yang lebih penting adalah sistem pelelangannya. Tujuan sesungguhnya daripada sistem pelelangan di daerah produksi adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual ikan hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan nelayan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Pelelangan ikan diselenggarakan oleh penyelenggara lelang secara terbuka diantara penjual dan pembeli yang dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak baik untuk nelayan maupun pedagang. Keuntungan bagi nelayan menurut IKPI, (1986) dalam Amin (2005) adalah :

1. Nelayan dapat menjual dengan harga terbaik.
2. Dalam pelelangan ikan berlaku sistem bersaing, dimana harga ditentukan atas penawaran dan permintaan sehingga nelayan mempunyai *bargaining position* yang bagus terhadap pedagang atau tengkulak.
3. Pelelangan ikan dapat digunakan sebagai stabilator harga, dalam arti kalau harga turun dan dianggap merugikan nelayan, penyelenggara pelelangan dapat ikut membeli ikan untuk mempertahankan harga.
4. Ikan dapat cepat terjual.
5. Nelayan tidak perlu menjajakan sendiri hasil produksinya yang akan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih

Sedangkan untuk pedagang/tengkulak keuntungannya antara lain : mereka mendapatkan ikan dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar, lebih cepat mencari barang sebagai dagangan, dan dapat menyediakan barang secara kontinyu.

### 2.3.3 Gedung Pelelangan Ikan

Gedung pelelangan ikan adalah merupakan pusat kegiatan dari suatu Pelabuhan Perikanan. Disini terjadi pertemuan antara penjual yaitu nelayan/pemilik kapal dengan pembeli yaitu pedagang atau agen pabrik perikanan. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai tempat melelangkan ikan. Mengingat ikan merupakan produk yang cepat busuk/rusak, disamping nelayan sendiri belum dapat memberikan jaminan sepenuhnya terhadap pengawetan ikan, maka letak gedung pelelangan harus dibangun berdekatan dengan dermaga dan terminal parkir.

Menurut Dirjen Perikanan (1985), gedung pelelangan ikan terbagi menjadi (3) tiga bagian, yaitu : untuk sortir/persiapan lelang, untuk pelelangan ikan dan untuk pengepakan. Menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 01/MEN/2007 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi, selain faktor diatas, TPI harus memenuhi persyaratan bahwa sanitasi dari tempat pelelangan harus diperhatikan, dimana konstruksi bangunan lantai memiliki kemiringan  $\pm 2\%$  agar benda cair segera mengalir ke saluran drainase, mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan; mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan, bangunan TPI bentuknya terbuka dan bebas cahaya dan udara masuk, sepanjang TPI dibuat pagar dan ada pintu agar tidak semua bisa masuk kedalam TPI.

### 2.4 Kebudayaan Masyarakat

Menurut Soekanto (1982), kata "kebudayaan" berasal dari (bahasa Sanskerta) *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau

“akal”. Demikian, ke-budaya-an itu dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”.

Sedangkan seorang antropolog lain, yaitu E.B Tylor (1871), memberikan definisi kebudayaan sebagai berikut :

“kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.”<sup>5</sup>

Sehingga kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi<sup>6</sup> merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Misalnya didalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan unsur-unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Cipta merupakan baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa dan cipta dinamakan pula kebudayaan rohaniah (*spiritual* atau *immaterial culture*)

Unsur-unsur kebudayaan secara umum ada tujuh, yaitu :

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan sebagainya).

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, halaman 172

<sup>6</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, halaman 115.

2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, perikanan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan lainnya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (kepercayaan).

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Kecuali itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan masyarakat tersebut, untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, sedang yang lainnya dari luar, karena keterbatasan kemampuan manusia.

Adakalanya kebudayaan masyarakat berinteraksi dengan kebudayaan asing. Dalam interaksi ini menimbulkan sikap memusuhi atau bahkan menerima kebudayaan asing tersebut. Akulturasi umum terjadi pada interaksi ini, yaitu bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian itu sendiri<sup>7</sup>. Konsep ini juga sesuai dengan konsep para ulama sejak dahulu dalam

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, halaman 247

menyikapi perubahan, yaitu *Almuhafadatu 'ala khodimi as-sholihah, Alakhdu bil jadidi al-aslhasah*, mempertahankan nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik.

Melihat kehadiran TPI yang relatif baru<sup>8</sup> bila dibandingkan dengan kegiatan perikanan di Indonesia, mengharuskan TPI sebagai sebuah inovasi untuk “bernegosiasi” dengan kebudayaan yang ada dimasyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Tugas utama TPI adalah menjualkan hasil tangkapan nelayan dengan sistem pelelangan. Dalam sistem ini banyak hal yang berbeda (gedung, timbangan, karcis, pengeras suara, retribusi) dari sebelumnya yang apabila nelayan pulang melaut hasil tangkapannya langsung dijual ke pedagang.

Menurut Soekanto (1982), ada dua tipe difusi, pertama difusi intra masyarakat (*intrasociety diffusion*), dan kedua difusi antar masyarakat (*inter-society diffusion*). Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi tersebut antara lain :

1. Suatu pengakuan bahwa unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan;
2. ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi diterimanya atau tidak diterimanya unsur-unsur yang baru;
3. unsur baru yang berlawanan dengan fungsi unsur lama, kemungkinan besar tidak akan diterima;
4. kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru tadi akan mempengaruhi apakah hasil penemuannya itu dengan mudah diterima atau ditolak;
5. pemerintah dapat membatasi/memaksa proses difusi tersebut.

Menurut Rogers dan Shoemoeker dalam Susilo (1986), Diffusi inovasi mempunyai pengaruh timbal balik dengan struktur sosial. Setiap strata berusaha

---

<sup>8</sup> di Jawa Timur pertama kali dibangun pada tahun 1971 di Puger dan di Panarukan. Susilo (1986).

mempertahankan dan atau meningkatkan struktur sosialnya atas dasar kepentingan masing-masing.

#### 1. Pedagang Ikan/ tengkulak

Bagi Pedagang, TPI merupakan institusi yang akan merebut ladang bisnisnya. Mereka beranggapan dengan adanya TPI, maka posisi mereka sebagai patron/orang tua asuh akan tereduksi. Hal ini otomatis akan mengakibatkan keuntungan yang mereka peroleh akan berkurang. Oleh sebab itu, pedagang akan berusaha mempertahankan posisinya dengan jalan mencari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem penjualan lewat pelelangan di TPI ini. Apabila mereka telah menemukan titik lemah tersebut, maka usaha eksploitasi mereka akan lebih kuat bila dibanding sebelumnya, hal ini sebagai bentuk anti klimaks.

#### 2. Nelayan

Walaupun selama ini mereka tahu kalau pedagang dalam mengambil keuntungan lebih besar dari hasil tangkapannya, mereka tidak berdaya untuk melawan. Mereka menganggap pedagang sebagai orang tua asuh yang harus dipatuhi. Bila dilanggar permintaannya, mereka takut terlantar, bagai anak ayam ditinggal induknya. Bila dilihat tujuan awal dibangunnya TPI, maka secara kasat mata pihak yang paling diuntungkan adalah nelayan. Hal ini karena di TPI diharapkan sistem pelelangan menempatkan nelayan berada pada posisi yang tidak diperdayai lagi oleh pedagang.

Nelayan hati-hati dalam mengambil keputusan dalam menyikapi TPI. Walaupun TPI menawarkan kemudahan-kemudahan, tapi mereka sulit untuk mengambil resiko jika berpindah ke hal-hal yang baru, dan ini merupakan karakter dari masyarakat desa.

## 2.5 Alat Tangkap *Purse Seine*

*Purse seine* adalah suatu alat penangkap ikan yang digolongkan dalam kelompok jaring lingkaran (*surrounding net*). Jaring *purse seine* efektif untuk menangkap ikan-ikan pelagis yang berada dalam kawasan yang besar, baik di perairan pantai atau lepas pantai. *Purse Seine* merupakan suatu alat penangkap ikan yang terdiri dari lembaran jaring yang digabung menjadi satu, pada bagian tepi atasnya terdapat pelampung dan tepi bawahnya terdapat pemberat serta sejumlah cincin sebagai tempat berlalunya tali kolor. Di dalam pengoperasian *Purse Seine*, tali kolor ditarik sehingga cincin-cincin yang terpasang pada jaring mengumpul jadi satu membentuk kantong. Karena pengopersiannya dengan cara menarik tali kolor, maka *Purse Seine* disebut jaring "Slerek" (Subani *et al*, 1989).

Kebanyakan ahli perikanan menganggap bahwa *Purse Seine* berasal dari Amerika dan pertama kali digunakan pada tahun 1826, kemudian menyusul Swedia pada tahun 1880, yang selanjutnya barulah Jepang memperkenalkan *Purse Seine* pada tahun 1882 yang digunakan untuk menangkap ikan Sardine. Sedangkan di Indonesia, *Purse Seine* mulai dikenal pada tahun 1950, tepatnya di Sumatera Utara bagian timur, dengan bahan jaring masih dari katun/lawe. Berikutnya pada tahun 1969 muncul *Purse Seine* tipe Aceh, khusus untuk menangkap ikan Cakalang (Maryuto, 1982).

Alat tangkap *purse seine* mulai dikenal oleh nelayan Prigi mulai tahun 1976 dan yang menggunakan *purse seine* pertama kali nelayan pendatang dari Bugis (Sulawesi Selatan). Sejak saat itulah terjadi pro dan sebagian besar kontra terhadap alat tangkap itu karena hasil tangkapan yang diperoleh melebihi batas kewajaran karena masyarakat Prigi pada waktu itu menggunakan alat tangkap yang masih tradisional (pancing ulur, jaring tarik / *Beach seine*). Sejak zaman itu,

sekitar 2 tahun setelah dirapatkan dan diputuskan mulai tahun 1978 nelayan serentak memperbolehkan menggunakan alat tangkap purse seine.

Prinsip dasar kerja daripada alat tangkap Purse Seine adalah dengan cara melingkari gerombolan ikan, dimana pada saat pengoperasian jaring ini dilingkarkan pada sasaran yang kemudian dilakukanlah penarikan tali kolor sehingga ikan-ikan yang dilingkari tersebut tidak dapat keluar dari jaring.

Setting alat tangkap Purse Seine yang dilakukan dalam satu trip biasanya sekitar dua sampai lima kali, tergantung hasil yang diperoleh. Apabila dalam satu kali setting hasil tangkap sudah dirasa banyak maka setting berikutnya tidak dilakukan. Keberhasilan setting ini tergantung dari konstruksi alat, daerah penangkapan dan ketrampilan nelayan dalam menebar dan menarik jaring.

Hasil penangkapan menggunakan alat tangkap purse seine terutama ikan pelagis. diantaranya: ikan tongkol, ikan lemuru dan ikan layang.



Gambar 6. Ikan hasil tangkapan alat tangkap purse seine

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dari penelitian berfungsi untuk menjelaskan skema dan acuan penelitian secara sistematis. Dengan dibuatnya kerangka pemikiran tersebut, maka tahapan dan prosedur dari penelitian akan terlaksana dan terkontrol dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam

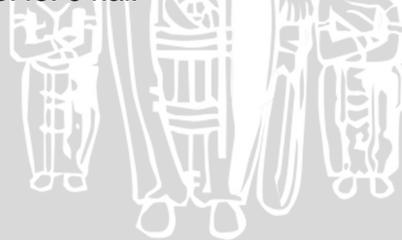
penelitian tersebut. Kerangka berpikir dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut :



Gambar 7. Kerangka Berpikir Penelitian

### Daftar pustaka

- Amin, M. 2005. *Analisis Sistem Tataniaga Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Pancing Rawe di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar, Kecamatan keruak Kabupaten Lombok timur, Nusa Tenggara Barat (study kasus pelelangan ikan Hiu di TPI tanjung Luar)*. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan
- Anonymous, 1985. *Administrasi Pelabuhan Perikanan*. Direktorat Bina Prasarana Perikanan, Dirjen Perikanan. Jakarta.120 hal
- Anonymous, 1997. *Ekonomi untuk SMU*. Tim MGMP Ekonomi SMA Negeri Kodia Surabaya. PT. Edumedia. Surabaya.174 hal.
- Engineer, A, 2007. *Islam dan Pembebasan*. LKiS. Yogyakarta. 155 hal
- Freddy Numbery.2004. *Kebijakan dan Program Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional*. Makalah pada Dialog Nasional Kelautan dan Perikanan HIMAPIKANI di Universitas Muhammadiyah Malang. 11 hal.
- Koentjaraningrat, 1983. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- Kusnadi, 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Pondok Edukasi & Pokja Pembaharuan. Bantul. 110 hal.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntanssi*. Salemba Empat. Jakarta. 646 hal
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Yayasan Badan Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Sosiologi suatu pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,.465 hal.
- Subani, W. dan H. R. Barus. 1989. *Alat Penangkapan Ikan dan Udang di Indonesia*. Balai Penelitian Perikanan Laut. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Perikanan. Jakarta
- Susilowati,T, Manadiyanto dan Nikijuluw, V. 1987. *Lembaga-lembaga Pemasaran Yang Membeli Hasil Tangkap Nelayan*. Jurnal pnal pen. Perikanan Laut No.43. 6 hal.
- UU No 31/2004



### 3 METODE PENELITIAN

#### 3.1 Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja, yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pertimbangan utama dalam memilih lokasi di TPI Prigi adalah karena TPI ini merupakan tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Trenggalek dan merupakan salah satu TPI di pantai selatan yang potensial baik dilihat dari jumlah ikan yang didaratkan ataupun jumlah pedagang dan nelayan yang ada, khususnya nelayan purse seine.

#### 3.2 Pendekatan Studi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1983).

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Menurut Nazir (1983) pendekatan studi kasus adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus yang diteliti. Keunggulan dalam penelitian studi kasus, terutama sangat berguna untuk informai latar belakang guna perencanaan penelitian yang lebih besar dalam ilmu-ilmu sosial. Unit telaah dalam studi kasus dapat berupa individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas tertentu.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer atau data tangan pertama menurut Nazir (1983) adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun cara pengambilan data primer yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 1983). Pada penelitian ini juga dilakukan pengambilan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pelelangan hasil tangkapan nelayan purse seine di TPI Prigi.

#### b. Wawancara

Menurut Nazir (1983), Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka juga dengan menggunakan alat bantu kuesioner agar lebih terarah. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada nelayan purse seine, pedagang ikan ataupun pihak TPI tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan sistem pelelangan di TPI Prigi baik secara sosial maupun ekonomi.

Tabel 1. daftar pertanyaan (quisioner)

No	Responden	Data yang diperlukan
.1.	Instansi TPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah karyawan yang bertugas di TPI</li> <li>- Tata cara pembuatan perizinan peserta pelelangan ikan melalui TPI</li> <li>- Tata cara pelelangan</li> <li>- Sarana dan prasarana yang digunakan di TPI</li> <li>- Jenis-jenis ikan hasil tangkapan nelayan purse seine yang dilelang di TPI</li> <li>- Dasar-dasar pertimbangan dalam penentuan harga</li> <li>- Sistem pembayaran oleh pembeli kepada nelayan</li> <li>- Ketentuan retribusi terhadap peserta pelelangan ikan</li> <li>- Pengelolaan keuangan TPI</li> <li>- Faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pada aktivitas pelelangan ikan</li> <li>- Sistem tataniaga/pelelangan yang menjadi harapan pedagang</li> </ul>
2.	Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis alat tangkap yang digunakan</li> <li>- Status kepemilikan alat tangkap</li> <li>- Jumlah produksi per trip</li> <li>- Pendapatan per trip</li> <li>- Jenis ikan yang didapat</li> <li>- Sistem bagi hasil yang digunakan</li> <li>- Sistem pemasaran hasil tangkapannya apakah dijual melalui TPI atau tidak</li> <li>- Harga yang terbentuk apakah sudah layak atau belum</li> <li>- Bagaimana hubungan antara nelayan dengan pedagang</li> <li>- Keuntungan/kerugian memasarkan melalui TPI</li> <li>- Sistem tataniaga/pelelangan yang menjadi harapan nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya.</li> </ul>
3.	Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah membeli ikan melalui TPI atau tidak</li> <li>- Jenis ikan yang dibeli</li> <li>- Pertimbangan dalam menentukan harga ikan</li> <li>- Proses perlakuan ikan setelah pembelian di TPI</li> <li>- Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian ikan</li> <li>- Keuntungan /kerugian membeli ikan melalui TPI</li> <li>- Bagaimana hubungan antara pedagang dengan nelayan</li> <li>- Sistem tataniaga/pelelangan yang menjadi harapan pedagang</li> </ul>

Sedangkan data sekunder pengumpulannya bukan diusahakan sendiri secara langsung oleh peneliti, tetapi diambil dari berbagai instansi yaitu TPI Prigi, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) kabupaten Trenggalek, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN) Prigi, Kantor desa Tasikmadu, dari laporan-laporan, jurnal penelitian, maupun bahan kepustakaan lainnya yang menunjang.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi: Data geografis dan batas wilayah, kondisi umum wilayah, kondisi secara umum penduduk, jumlah armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakan penduduk, kegiatan perikanan yang dilakukan penduduk dan catatan nelayan ketika melakukan operasi penangkapan ikan.

### **3.4 Prosedur Penarikan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989) mengatakan bahwa, populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan menurut Nazir (1983), populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitian tersebut merupakan penelitian populasi atau sensus. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kelompok nelayan purse seine (2.875 jiwa), pedagang ikan/tengkulak (1.201 jiwa) dan instansi pemerintah/penyelenggara pelelangan di TPI Prigi (20 jiwa).

#### **3.4.2 Penentuan Sampel**

Sampel merupakan contoh sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi. Tujuan lainnya dari penentuan sampel adalah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari suatu penelitian.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dari suatu penelitian yaitu :

a. Derajat keseragaman populasi

Makin seragam populasi makin kecil sampel yang diambil.

b. Presisi yang dikehendaki dari penelitian

Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki makin besar jumlah sampel yang diambil. Jadi sampel yang besar cenderung memberikan penduga yang lebih mendekati nilai sesungguhnya.

c. Rencana analisa

Adakalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan presisi yang dikehendaki, tetapi kalau dikaitkan dengan kebutuhan analisa maka jumlah sampel tersebut kurang mencukupi.

d. Tenaga, biaya, dan waktu

Kalau menginginkan presisi yang tinggi maka jumlah sampel harus besar sehingga biaya yang dikeluarkan juga besar dan waktu yang digunakan juga lebih lama (Mantra dan Kastro, 1989).

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik *purposif sampling*. Menurut Sudjana (1996), teknik ini terjadi apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. *Purposif sampling* akan baik hasilnya di tangan seorang yang mengenal populasi dan yang dapat segera mengetahui lokasi masalah-masalah yang khas.

Pada penelitian ini, sebagian nelayan, pedagang, maupun karyawan dipilih dengan sengaja oleh peneliti untuk dijadikan sampel. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 orang. Beberapa pertimbangan dalam penentuan sampel yang akan diambil dalam setiap populasi adalah :

1. Responden nelayan purse seine diambil 15 orang, yang terdiri atas 5 nelayan pemilik kapal dan 10 nelayan buruh/ABK, dengan pertimbangan bahwa komunitas nelayan purse seine terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh/ABK.



2. Pedagang ikan yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 5 orang dengan pertimbangan jumlah anggota populasi relatif sedikit dan bersiat homogen.
3. Pihak TPI (petugas) diambil sebagai sampel sebanyak 3 (kepala TPI, bendahara dan petugas administrasi) dengan pertimbangan instansi TPI merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pelelangan ikan.

### **3.5 Analisa Data**

Menurut Singarimbun dkk (1989), analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif. Tujuan analisa deskriptif kualitatif adalah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis tercapai, sedangkan deskriptif kuantitatif dilakukan untuk lebih mendukung data-data kualitatif sebelumnya.

Analisa deskriptif yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

#### **3.5.1 Analisa Proses Pelelangan Ikan**

Untuk mengetahui proses pelelangan yang terjadi di TPI Prigi digunakan Analisa deskriptif. Data penelitian yang berkaitan dengan proses pelelangan ikan di TPI adalah dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang meliputi kegiatan pra pelelangan, pelelangan sampai dengan proses pembayaran yang ada.



### 3.5.2 Analisa Efisiensi Sistem Pelelangan ikan di TPI Prigi (*Performance* Usaha Nelayan Purse Seine, Pedagang, Instansi TPI)

Dua konsepsi utama untuk mengukur prestasi kerja (*performance*) adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik, atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*) (Handoko, 1999).

Untuk mengukur tingkat kelayakan/*performance* dari usaha yang dijalankan nelayan maupun pedagang dapat diketahui dengan menggunakan rumus *Revenue Cost Ratio* (R/C ratio) atau dikenal dengan perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Sedangkan untuk mengetahui *performance* dari pihak TPI dapat dianalisa dengan melihat dan menginterpretasikan dari laporan pertanggungjawaban tahunan yang dilakukan TPI.

R/C ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$R/C = \frac{\text{Penerimaan (r)}}{\text{Total Biaya (c)}}$$

Keterangan :

Penerimaan = perkalian produksi dengan harga

Total Biaya = jumlah biaya tetap dan biaya tidak tetap

Apabila dalam perhitungan analisa R/C ratio didapatkan R/C ratio >1 berarti usaha tersebut memberikan keuntungan, apabila R/C ratio < 1 berarti usaha tersebut mengalami kerugian, dan apabila R/C ratio =1 berarti usaha tersebut pada kondisi titik impas.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pelelangan, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Hanafiah dan Saefudin, 2006 yaitu :

$$\text{Marketing Margin} = \frac{P_s - P_b}{V}$$

Keterangan :

- $P_s$  : Nilai penjualan  
 $P_b$  : Nilai pembelian  
 $V$  : Volume barang dagangan

### 3.5.3 Analisa Efektivitas Sistem Pelelangan ikan di TPI Prigi

Menurut Handoko (1999), efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain pemilihan pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem pelelangan di TPI Prigi dilakukan analisa kelayakan teknis maupun kelayakan secara fungsional dalam penyelenggaraan pelelangan.

#### 1. Kelayakan Teknis TPI

Mengacu pada Dirjen Perikanan (1985) dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 01/MEN/2007 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi, kriteria penilaian kelayakan teknis TPI adalah berupa konstruksi dan kelengkapan bangunan fisik TPI, meliputi : kemiringan lantai TPI, bentuk bangunan, persediaan air bersih, penerangan, serta perlengkapan lainnya sebagai tempat penyelenggaraan proses pelelangan ikan.

Analisa kelayakan teknis ini menggunakan sistem pembobotan, dengan kriteria unsur penilaian sebagai berikut :

Tabel 2. penilaian kelayakan TPI secara teknis

No.	Unsur yang dinilai	Kriteria bobot	Bobot
1.	Konstruksi lantai TPI ❖ kemiringan 2% ❖ kemiringan 1% - 1,9% ❖ kemiringan 0,0% – 0,9%	B	3
		S	2
		K	1
2.	Penerangan ❖ tersedia lengkap ❖ cukup ❖ kurang	B	3
		S	2
		K	1
3.	Ketersediaan air bersih ❖ Banyak ❖ Sedang ❖ Kurang	B	3
		S	2
		K	1
4.	Drainase ❖ Berfungsi dengan baik ❖ Kondisi sedang ❖ Tidak berfungsi	B	3
		S	2
		K	1
5.	Dinding dan lantai ❖ Keramik putih kondisi bersih ❖ Keramik warna lainnya ❖ Dari semen dan kotor	B	3
		S	2
		K	1
6.	Peralatan timbang ❖ Jumlah mencukupi ❖ Jumlah tidak mencukupi ❖ Jumlah sangat kurang	B	3
		S	2
		K	1
7.	Bak sampah dan pagar ❖ Tersedia cukup dan lengkap ❖ Kurang lengkap ❖ Sangat kurang	B	3
		S	2
		K	1

Keterangan :

- (B) : Baik
- (K) : Kurang
- (S) : Sedang

Interpretasi penilaian terhadap tingkat kelayakan teknis TPI

- Nilai > 14,7 atau tingkat kesesuaian 70% ke atas, maka dapat dikategorikan bahwa TPI bagus secara teknis
- Nilai 8,4 -14,7 atau tingkat kesesuaian 40% - 70%, maka TPI bagus secara teknis termasuk standar/sedang
- Nilai <8,4 atau tingkat kesesuaian kurang dari 40%, maka TPI secara teknis kurang layak.

## 2. Kelayakan fungsional TPI

Analisa kelayakan fungsional TPI sebagai penyelenggara pelelangan meliputi tingkat kelayakan fungsi-fungsi TPI yang telah berhasil diterapkan dan yang belum diterapkan sesuai dengan fungsi diadakannya TPI bagi nelayan, pedagang maupun pemerintah (Kep. Bupati Trenggalek No. 61 tahun 2003 Tentang penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek).

Sistem analisa yang digunakan adalah dengan pemberian bobot atau nilai dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 3. penilaian kelayakan TPI secara fungsional

No.	Unsur yang dinilai	Kriteria bobot	Bobot
1.	Daya tampung TPI		
	❖ > 70% total ikan yang didaratkan	B	3
	❖ antara 40% - 70% ikan yang didaratkan	S	2
	❖ < 40% ikan yang didaratkan	K	1
2.	Fungsi penimbangan		
	❖ semua ikan yang didaratkan	B	3
	❖ antara 40% - 70% ikan yang didaratkan	S	2
	❖ < 40% ikan yang didaratkan	K	1
3.	Menyediakan data-data statistik		
	❖ lengkap dan akurasi >70%	B	3
	❖ akurasi data 40% - 70%	S	2
	❖ tidak akurat <40%	K	1
4.	Pembinaan mutu hasil perikanan (cold box, cold storage, dll)		
	❖ lengkap	B	3
	❖ sedang	S	2
	❖ kurang	K	1
5.	Sistem pembayaran		
	❖ langsung 100%	B	3
	❖ tidak langsung (1 – 2 hari)	S	2
	❖ tidak langsung (dibayar >3 hari)	K	1
6.	Harga yang terbentuk		
	❖ layak, tidak terjadi monopoli	B	3
	❖ cukup layak	S	2
	❖ tidak layak, terjadi monopoli	K	1
7.	Sumber PAD		
	❖ retribusi	B	3
	❖ berjalan tidak sesuai peraturan (5%)	S	2
	❖ tidak berjalan	K	1

Keterangan :

(B) : Baik

(K) : Kurang

(S) : Sedang

Interpretasi penilaian terhadap tingkat kelayakan secara fungsional TPI

- Nilai  $> 14,7$  atau tingkat kesesuaian 70% ke atas, maka dapat dikategorikan bahwa TPI bagus secara fungsional
- Nilai  $8,4 - 14,7$  atau tingkat kesesuaian 40% - 70%, maka TPI bagus secara fungsional termasuk standar/sedang
- Nilai  $< 8,4$  atau tingkat kesesuaian kurang dari 40%, maka TPI secara fungsional kurang layak.

#### **3.5.4 Analisa Persepsi Stake Holder Terhadap Sistem Pelelangan Yang Berlangsung**

Pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisa persepsi dan bentuk hubungan yang terjalin antara pihak nelayan, pedagang dan TPI adalah pendekatan deskriptif. Dalam pendekatan ini akan menguraikan tentang kondisi lapang hubungan antara nelayan, pedagang ataupun TPI apakah bersifat mutualisme atau bersifat eksploitasi.

#### **3.6 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi dan di tengah-tengah masyarakat Pantai Prigi Kecamatan Watulimo, Trenggalek yang berhubungan dengan proses pelelangan hasil perikanan tangkap nelayan Purse seine di TPI Prigi. Waktu pelaksanaannya pada bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Juli 2008.

## 4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

### 4.1 Letak Geografis dan Keadaan Topografi

TPI Prigi terletak di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang dibangun di atas lahan seluas 27,5 Ha dengan luas tanah 11,5 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha. Terletak di Teluk Prigi pada posisi koordinat  $111^{\circ} 43' 58''$  BT dan  $08^{\circ} 17' 22''$  LS, yang tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Dengan jarak ke ibu kota Propinsi (Surabaya) adalah  $\pm 200$  km, dan jarak ke ibu kota Kabupaten (Trenggalek) adalah  $\pm 47$  km.

Tinggi daerah Watulimo sekitar 299 meter dari permukaan laut. Suhu perairan Watulimo rata-rata  $27^{\circ}$  C. Sedangkan keadaan curah hujan pertahun di wilayah Watulimo 27,0 mm per tahun. Sungai-sungai di wilayah Watulimo berukuran kecil, oleh karena itu hanya berfungsi sebagai sarana pengairan sawah.

Iklm di wilayah Watulimo adalah iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada Bulan April sampai Bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada Bulan Oktober sampai Bulan April.

Kecamatan Watulimo terbagi atas 5 desa pantai, yaitu Desa Tasikmadu, Desa Karanggandu, Desa Prigi, Desa Margomulyo, dan Desa Sawahan. Dari kelima Desa tersebut, Desa Tasikmadu adalah desa yang berbatasan langsung dengan Pantai Prigi.

Desa Tasikmadu terletak pada posisi koordinat  $8^{\circ} 17' 43''$  LS dan  $8^{\circ} 24' 25''$  LS serta  $111^{\circ} 43' 08''$  BT dan  $111^{\circ} 45' 08''$  BT. Desa Tasikmadu terdiri dari 3 dusun, 6 RW, dan 37 RT. Luas wilayah dari Desa Tasikmadu sekitar 2.845,743 Ha. Adapun batas-batas dari Desa Tasikmadu adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Besuki dan Samudera Hindia

Secara umum kondisi topografis Desa Tasikmadu adalah perpanjangan lereng pegunungan kapur selatan dengan rata-rata ketinggian tiga meter diatas permukaan laut. Struktur tanahnya sangat bagus untuk tanaman jati, selain itu juga digunakan untuk area persawahan yang banyak terdapat di bagian utara Desa Tasikmadu.

Perairan Desa Tasikmadu merupakan perairan teluk dengan dasar lumpur bercampur pasir dan sedikit berbatu karang. Teluk ini dinamakan teluk prigi yang mempunyai kedalaman 6-45 meter.

#### **4.2 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

Desa Tasikmadu mempunyai jumlah penduduk pada tahun pendataan 2007 sekitar 10.278 orang dengan komposisi 5.085 orang penduduk laki-laki dan 5.193 orang penduduk perempuan dan jumlah Kepala Keluarga 3.756 jiwa. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Tasikmadu berdasarkan lapangan usahanya pada tahun pendataan 2007.



Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bidang Perikanan	1.948	27,20
2	Bidang Pertanian/Peternakan	4.022	56,15
3	Bidang Perdagangan	279	3,89
4	Pegawai Negeri (TNI, POLRI)	194	2,70
5	Pegawai Swasta	521	7,27
6	Industri	18	0,25
7	Jasa	172	2,40
8	DLL	8	0,11
Jumlah		7.162	100

Sumber : Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2008

Dari data kependudukan Desa Tasikmadu didapatkan bahwa sejumlah petani lebih banyak dari pada nelayan. Hal ini disebabkan karena pada musim tanam mereka banyak turun sebagai petani, pemilik, penggarap maupun buruh tani. Setelah selesai musim tanam mereka menjadi ABK dengan istilah yang mereka pakai yaitu *ngadim*.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sebagian besar tamat SD/ sederajat sebanyak 3.255 orang, kemudian tamat SLTP/ sederajat sebanyak 2.803 orang, kemudian tamat SLTA/ sederajat sebanyak 2.582 orang, tamat perguruan tinggi sebanyak 178 orang, dan tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 1.251 orang. Selengkapnya data tentang jumlah penduduk Desa Tasikmadu berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pasca Sarjana	2	0,01
2	Sarjana/Diploma	176	1,74
3	SLTA/Sederajat	2.582	25,64
4	SLTP/Sederajat	2.803	27,83
5	SD/Sederajat	3.255	32,32
6	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	1.251	12,42
Jumlah		10.069	100

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2008

Berdasarkan data diatas sebagian besar penduduk Tasikmadu tamat SD sebanyak 3.255 orang sehingga kurang mampu diajak untuk berkembang dalam mengelola sumberdaya perikanan di prigi karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Berdasarkan penggolongan usia, penduduk Desa Tasikmadu paling banyak berada pada umur kurang dari 15 tahun sebanyak 2.169 orang, sedangkan yang paling rendah berada pada kisaran 55 - 65 tahun sebanyak 1.276 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Lebih dari 65 tahun	1.289	12,54
2	55 – 65 tahun	1.276	12,41
3	45 – 54 tahun	1.293	12,58
4	35 – 44 tahun	1.342	13,05
5	25 – 34 tahun	1.387	13,49
6	15 – 24 tahun	1.522	14,80
7	Kurang dari 15 tahun	2.169	21,10
Jumlah		10.278	100

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2008

Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk Desa Tasikmadu beragama Islam sebanyak 10.237 orang kemudian agama Kristen sebanyak 40 orang, dan agama Hindu sebanyak 1 orang. Untuk menunjang kegiatan keagamaan terdapat sarana peribadatan yaitu masjid dan mushola serta gereja. Di desa Tasikmadu sering diadakan kegiatan keagamaan antara lain seperti yasinan yang diadakan secara bergiliran dan setiap sore anak-anak mengaji di langgar. Hal ini membuktikan keagamaan di lingkungan mereka berjalan secara rutinitas sehingga melekat dalam kegiatan mereka sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan mereka.

### 4.3 Keadaan umum perikanan

#### 4.3.1 Kegiatan Usaha Perikanan

Kegiatan usaha perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi baik di bidang penangkapan maupun pengolahan pada umumnya masih bersifat tradisional. Pada tahun 2008 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pelabuhan masih sedikit jumlahnya. Selain Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Prigi (PPPS Cabang Prigi), kegiatan perusahaan perikanan yang sudah menginvestasikan usahanya di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah:

- PT. Prima Indo Bahari Sentosa bidang usaha *cold storage* dan pabrik es.
- PT. Bumi Mina Jaya bidang usaha tepung ikan dan pengolahan hasil perikanan.
- PT. Sumber Pangan Nasional bidang usaha *cold storage*.

Untuk melihat rincian penyerapan tenaga kerja yang melakukan kegiatan perikanan di PPN Prigi dari tahun 2003-2007 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di PPN Prigi Tahun 2003-2007

No.	Tahun	Nelayan	Pedagang / Pengolah Ikan	Pekerja Lainnya	Jumlah (orang)
1	2003	4.325	337	319	4.981
2	2004	5.526	975	1.043	7.544
3	2005	6.235	975	1.328	8.538
4	2006	6.271	975	1.373	8.619
5	2007	6.271	1.201	1.392	8.864

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008

Penyerapan tenaga kerja yang melakukan kegiatan perikanan di PPN Prigi pada tahun 2007 adalah sebesar 8.864 orang. Dibanding tahun 2006 yaitu sebesar 8.619 orang, maka pada tahun 2007 di lingkupan PPN Prigi terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 245 orang atau 2,84%.

Sedangkan untuk melihat jumlah nelayan berdasarkan alat tangkap yang ada di PPN Prigi dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Komposisi Nelayan di PPN Prigi

No	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan (Jiwa)
1	Nelayan alat tangkap <i>purse seine</i>	2.875
2	Nelayan alat tangkap <i>gill net</i>	129
3	Nelayan alat tangkap jaring klitik	100
4	Nelayan alat tangkap pancing ulur	1.298
5	Nelayan alat tangkap pukat pantai	1.008
6	Nelayan alat tangkap payang	576
7	Nelayan alat tangkap pancing tonda	285
Jumlah		6.271

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008

Bila kita lihat tabel diatas, maka nelayan yang paling banyak jumlahnya adalah yang menggunakan alat tangkap Purse Seine sebesar 2. 875 orang atau 45,85%. Hal ini terjadi karena dalam satu alat tangkap purse seine dioperasikan oleh rata-rata 20 orang ABK.

#### 4.3.2 Musim Penangkapan Ikan

Musim ikan di PPN Prigi pada tahun 2007 terjadi pada bulan Januari, Juli, September, Oktober dan Nopember dengan musim puncak pada bulan Oktober. Pada bulan-bulan tersebut terjadi kenaikan produksi bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, hal ini dipengaruhi oleh musim, angin dan arus laut.

#### 4.3.3 Jumlah Armada Perikanan dan Jenis Alat Tangkap

Pada tahun 2007 armada penangkapan yang digunakan berjumlah 1.032 unit dengan ukuran kapal di bawah 30 GT, yaitu terdiri dari kapal berukuran < 10 GT berjumlah 641 unit (62,11 %), 10 - < 20 GT berjumlah 151 unit (14,63 %), dan 20 - < 30 GT berjumlah 240 unit (23,26 %). Dibandingkan dengan pada tahun 2006 sebesar 1.107 unit, berarti mengalami penurunan sebesar 75 unit (6,77 %). Frekwensi kunjungan kapal pada tahun 2007 ini tercatat 22.854 kali yang berarti

mengalami penurunan sebesar 98 kali (0,43 %) dari tahun 2006 sebesar 22.952 kali

Berikut ini rincian jumlah armada penangkapan menurut ukuran kapal yang ada di PPN Prigi Kabupaten Trenggalek bisa dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Armada Penangkapan Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi Tahun 2003–2007

NO	Ukuran Kapal	Jumlah Kapal Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	< 10 GT	477	674	649	741	641
2.	10 - < 20 GT	85	73	105	136	151
3.	20 - < 30 GT	112	115	120	230	240
	Jumlah	679	862	874	1.107	1.032

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008

Jumlah alat tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi pada tahun 2007 adalah sebesar 948 yang terdiri dari Pancing ulur berjumlah 546 unit (57,59 %), Pukat cincin berjumlah 120 unit (12,66 %), Pancing tonda berjumlah 72 unit (7,59 %), Pukat pantai berjumlah 42 unit (4,43 %), Pancing prawe berjumlah 36 unit (3,80 %), Jaring klitik berjumlah 53 unit (5,59 %), Jaring insang berjumlah 43 unit (4,54 %), Payang berjumlah 36 unit (3,80 %). Dibanding dengan jumlah alat tangkap pada tahun 2006 sebesar 1.677 unit, berarti mengalami penurunan sebesar 729 unit.

Berikut ini rincian jumlah alat tangkap menurut jenisnya yang ada di PPN Prigi Kabupaten Trenggalek bisa dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun 2003-2007

No	Jenis Alat Tangkap	Tahun / Years (unit)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pukat Cincin / <i>Purse Seine</i>	112	230	240	115	120
2	Jaring Insang / <i>Gill Net</i>	10	17	34	43	43
3	Payang / <i>Boat Seine</i>	35	28	20	36	36
4	Pukat Pantai / <i>Beach Seine</i>	33	40	42	42	42
5	Pancing Prawe / <i>Long Line</i>	282	25	36	36	36
6	Pancing Ulur / <i>Hand Line</i>	286	1.158	1.298	1.298	546
7	Pancing Tonda / <i>Trawl Line</i>	0	28	51	57	72
8	Jaring Klitik / <i>Gill Net</i>	2	30	36	50	53
Jumlah (unit) / <i>Total (units)</i>		760	760	1.556	1.757	1.677

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008

Berdasarkan laporan oleh PMP2SP Jawa Timur tahun 2000/2001 dijelaskan bahwa daerah Prigi dibedakan menjadi 4 daerah yaitu, 1) daerah operasi lepas pantai yang dilakukan oleh nelayan gill net, prawe dan pancing ulur, 2) daerah operasi luar pantai terutama dilakukan oleh alat purse seine dan payang, 3) daerah operasi pantai secara khusus dilakukan oleh jaring tarik dan 4) daerah operasi karang untuk menangkap udang barong dan ikan karang terutama dilakukan oleh jaring pethotan, belengker, ether dan pithil.

Alat tangkap gill net dioperasikan didaerah luar pantai, diluar teluk Prigi sampai ± 40 mil kearah Samudera Indonesia. Alat tangkap ini sering dioperasikan dengan alat tambahan pancing prawe. Hasil tangkapan gill net ini terutama adalah jenis ikan tuna dan cakalang. Alat ini yang juga dioperasikan pada daerah diluar teluk Prigi ini adalah pancing ulur.

Untuk daerah operasi jaring purse seine dan payang hampir tumpang tindih. Namun perbedaan terletak pada jaring payang lebih memungkinkan untuk dioperasikan di daerah pinggir, bahkan mendekati tepi karang dan pantai curam. Daerah operasi kedua alat tangkap ini terletak pada sekitar gugus pulau-pulau didalam teluk Prigi (pulau Sari, Anakan, Tanengan, Boyolangu, Solimo, Batay, Siklapa, Sasah, Seksal ).

Daerah operasi jaring tarik di Prigi dibagi menjadi 3 lokasi utama yaitu, 1) Labuhan Prigi, 2) Labuhan Damas, 3) Labuhan Karanggongso. Masing-masing daerah terbagi atas sub area. Area Prigi terdiri dari penangkapan : Siwaan-1, Siwaan-2, Udang Galah, Waru Doyong, Ngresep, Blandoyo dan Cengkong Kulon. Daerah operasi pantai Damas dibagi atas sub area : Wonojoyo, Ngekel, Pancer Bang, Ngemplung Kulon, Bujelan, Ngrumpelan dan Gledong. Area penangkapan pantai Karanggongso terdiri atas : Pasir Putih, Watu Dukuh, dan Den Roso. Daerah penangkapan yang banyak dipilih adalah Prigi dan Damas.

Sedangkan untuk daerah operasi alat tangkap jaring pethotan, pithil, blengker dan edher adalah diujung goa batu dan karang malang. Karena kedua lokasi tersebut merupakan tepian pantai curam, maka banyak habitat untuk tempat berlindung ikan-ikan karang dan udang barong.

Penangkapan ikan diperairan umum dilakukan disungai dan ceck dam yang ada dengan mempergunakan alat tangkap yang sederhana seperti jala dan pancing. Meskipun jumlahnya kecil namun kegiatan penangkapan diperairan umum dilakukan disemua wilayah Kecamatan Kabupaten Trenggalek. Usaha penangkapan ikan di perairan umum merupakan usaha sampingan bagi penduduk yang mayoritas adalah pantai.

#### 4.3.4 Produksi Perikanan

Pada tahun 2007 volume produksi perikanan yang didaratkan di PPN Prigi sebesar 22.332 ton dengan nilai Rp 92.259.150.000. Dibanding dengan tahun 2006 sebesar 23.603 ton dengan nilai Rp 83.485.900.000. Berarti mengalami penurunan volume sebesar 1.271 ton atau 5,38% dan nilai produksi mengalami peningkatan sebesar Rp 8.773.250.000 atau 10,51%.

Selengkapnya data tentang perkembangan produksi perikanan disajikan dalam tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2003–2007

No.	Tahun	Volume (Ton)
1	2003	46.756
2	2004	17.794
3	2005	14.346
4	2006	23.603
5	2007	22.332

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008

Penurunan produksi ikan ini dikarenakan pada tahun 2007 tidak terjadi musim ikan, selain itu produksi ikan unggulan seperti ikan lemuru dan ikan cakalang mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya jenis ikan yang didaratkan di PPN Prigi Pada tahun 2006 - 2007 dapat dilihat pada table 12 berikut ini.

Tabel 12. Jumlah Produksi Ikan Pada Tahun 2006 Dan Tahun 2007 Berdasarkan Jenisnya

Jenis ikan	Tahun 2006 (Ton)	Tahun 2007 (Ton)
Alu-alu	17	3
Bentong	45	14
Biji nangka	0	0
Cakalang	1.327	942
Cucut lanyam	141	39
Ekor merah	90	51
Kakap	0	0
Kembung	58	9
Kwee	12	124
Layang benggol	448	0
Layang deles	4.395	5.189
Layaran	0	0
Layur	446	686
Lemadang	9	33
Lemuru	8.036	4.502
Manyung	1	0
Pari kembang	100	50
Peperek	96	30
Selar hijau	0	76
Slengseng	86	156
Swanggi	1	0
Tembang	22	2
Teri ijo	7	0
Tengiri	8	0
Teri	356	0
Tetengkek	1	4
Tongkol como	7.309	9.998
Tuna mata besar	583	373
Lain-lain	9	27
Jumlah	23.603	22.332

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008

Volume jenis ikan yang terbanyak didaratkan di PPN Prigi adalah ikan dengan produk ikan unggulan jenis ikan pelagis seperti ikan Tongkol como 9.998 ton, Layang 5.189 ton, Lemuru 4.502 ton, Cakalang 942 ton, Layur 686 ton, Tuna mata besar 373 ton, Slengseng 156 ton dan jenis lainnya 486 ton dengan total nilai Rp 92.259.150.000.

#### 4.3.5 Pemasaran Ikan

Produksi hasil tangkap di wilayah PPN Prigi dipasarkan dalam kondisi segar dan dalam bentuk hasil olahan seperti pemindangan, pengasapan,

pengeringan / penggaraman dan tepung ikan. Daerah pemasaran masih sebatas wilayah Jawa Timur yaitu di kota Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Surabaya, Malang, Jombang dan Madiun. Produksi perikanan dari PPN Prigi yang didistribusikan dalam bentuk ikan segar sebesar 4.742 ton (21,23 dan ikan olahan sebesar 17.590 ton (78,77%) yang meliputi ikan pindang 12.849 ton (57%), ikan asin 2.525 ton (11,31%), tepung ikan 2.024 ton (9,06%) dan ikan asap 194 ton (0,87%). Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Jenis Dan Jumlah Pengolahan Ikan Di PPN Prigi tahun 2007

Bulan	Pengasinan	Pindang	Pengasapan	Tepung Ikan	Pendinginan	Jumlah (ton)
Januari	232	1.299	37	0	911	2.479
Pebruari	142	909	6	0	231	1.288
Maret	93	0	25	0	149	267
April	100	904	24	0	181	1.209
Mei	289	256	9	0	251	805
Juni	180	1.406	25	0	385	1.996
Juli	205	1.696	9	300	268	2.478
Agustus	277	572	23	0	551	1.423
September	350	1.131	12	811	670	2.974
Oktober	465	2.978	6	663	498	4.610
Nopember	105	1.458	12	250	364	2.189
Desember	87	238	6	0	283	614
Jumlah (ton)	2.525	12.847	194	2.024	4.742	22.332

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008

#### 4.3.6 Lembaga Perikanan

##### a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang prasarana Pelabuhan Perikanan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2004, ruang lingkup penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan adalah sebagai prasarana perikanan meliputi perencanaan dan penetapan

lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengusaha, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.



Gambar 8. Kantor PPN Prigi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagai suatu lingkungan kerja menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan.
2. Pelayanan teknis kapal perikanan.
3. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
4. Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
6. Pelaksanaan pengawasan penangkapan, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
7. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan.

8. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya.
9. Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari.
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fasilitas pelabuhan yang telah dibangun di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Berikut tabel rincian fasilitas pelabuhan

Tabel 14. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

No.	Nama Fasilitas	Jumlah / Volume
I	Fasilitas Pokok	
	1. Lahan : a. Tanah	11,5 Ha
	b. Kolam	15 Ha
	2. Kolam Pelabuhan : a. Sebelah Barat	7 Ha
	b. Sebelah Timur	8 Ha
	3. Break Water	710 m
	4. Dermaga	652 m
	5. Jalan Komplek	1.123,5 m
	5. Revetment	830 m
II	Fasilitas Fungsional	
	1. Kantor	655 m <sup>2</sup>
	2. Gedung TPI : 1. Sebelah Barat	940 m <sup>2</sup>
	2. Sebelah Timur	400 m <sup>2</sup>
	3. Pabrik Es	20 ton/hari
	4. SPDN / BBM	50 ton
	5. Tower Air	30 ton
	6. Bak Air	40 ton
	7. Bengkel	120 m <sup>2</sup>
	8. Jaringan Listrik PLN	250 KVA
	9. MCK	90 m <sup>2</sup>
	10. Pos Keamanan : a. Pos Satpam	26 m <sup>2</sup>
b. Pos Terpadu	120 m <sup>2</sup>	
	11. Telepon	7 unit
	12. Lampu Suar	4 unit
III	Fasilitas Penunjang	
	1. Rumah Dinas	4 unit
	2. Guest House	1 unit
	3. BPN	300 m <sup>2</sup>
	4. Kios BAP	54 m <sup>2</sup>
	5. Gudang	200 m <sup>2</sup>
	6. Kios Tertutup	16 unit x 24 m <sup>2</sup>
	7. Kios Terbuka	14 unit x 22,5 m <sup>2</sup>
	8. Gudang Pengepakan	180 m <sup>2</sup>
9. Kendaraan Dinas	6 Bh. Roda 2, 2 Bh. Roda 4	

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008

## b. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003.

Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 804 Tahun 2003, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 804 Tahun 2003, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan, usaha kelautan dan perikanan serta budidaya dan perbenihan perikanan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kelautan dan perikanan.
3. Penjabaran dan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan wewenang daerah di bidang kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan.
5. Penyelenggaraan dan pengelola administrasi dan urusan rumah tangga Dinas.
6. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

### c. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang sudah terbentuk adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004 Tanggal 21 April 2004, tugas TPI adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pelayanan pelelangan ikan. Untuk melaksanakan tugas, TPI mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pelelangan ikan;
2. Penyelenggaraan tata usaha tempat pelelangan ikan;
3. Pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan;
4. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan;
5. Pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pelelangan ikan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI adalah Bupati dan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Struktur organisasi TPI Prigi berdasarkan Perda No. 28 / 2002 adalah :

1. Kepala TPI, dengan fungsi sebagai manager dan administrator.
2. Kepala Bidang Tata Usaha, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Lelang, Kepala Bidang Jasa Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Kepegawaian.
3. Kepala Sub Bidang terdiri dari 4 Juru yaitu Buku, Lelang, Timbang, Loket.

4. Jumlah petugas TPI yaitu 20 personil terdiri dari :
  - a. 7 (Tujuh) personil PNS.
  - b. 13 (Tiga belas) personil karyawan tetap.



Gambar 9. Tempat Pelelangan Ikan PPN Prigi

Manfaat dan tingkat operasional dari TPI Prigi yaitu :

1. TPI I (TPI Barat) dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya lebih dari 15 GT.
2. TPI II (TPI Timur) dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya kurang dari 15 GT.

## 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun pertama kali di Jawa Timur pada tahun 1971 di Puger (Jember) dan Panarukan (Situbondo). TPI dibangun pada Pusat-Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan pada sentra-sentra budidaya (Susilo,1986). TPI Prigi dibangun tahun 1976, pembangunan TPI dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Propinsi Jawa Timur. Pelaksanaan TPI di Prigi Watulimo pada tahun 1976 diserahkan penyelenggaraannya kepada Koperasi Unit Desa Mina Tani Sempurna (KUD MTS) sampai tahun 2000. Pada tahun 2000 sampai tahun 2003 pengelolaan TPI Prigi dikelola oleh Koperasi Sinati dan KBN. Sinati adalah koperasi yang merupakan manifest dari para juragan/pemilik alat tangkap purse seine, sedangkan KBN adalah Koperasi Bakul Nelayan. Mulai tanggal 22 Juni 2003 sampai Desember 2003 dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dengan pendapatan retribusi sejumlah Rp 145.101.770,00. Pada tahun 2004 TPI Prigi dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sistem Swakelola. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004 tanggal 21 April 2004 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja TPI sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, maka TPI Prigi dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek hingga sekarang.

Adapun fungsi dari TPI Prigi menurut keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2003 Bab II, Pasal 3 adalah: menjamin kelestarian sumberdaya alam, Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, memberdayakan kapasitas dan partisipasi masyarakat nelayan, peningkatan kontribusi PAD (pendapatan asli daerah), pusat data eksplorasi perikanan dan sumberdaya laut lainnya.

Pada tahun 2007 jumlah ikan yang dilelang di TPI Prigi adalah sebanyak 7.944.441 Kg dengan nilai harga sebesar Rp 15.348.536.000,- dengan rincian jenis-jenis ikan yang dilelang sebagai berikut

Tabel 15. Jenis-Jenis Ikan Yang Dilelang Di TPI Prigi Pada Tahun 2007

No	Jenis Ikan	Harga Ikan per Kg (Rp)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Tongkol	2.537	4.150.929	10.530.629.500
2	Layang	1.254	1.754.264	2.200.466.000
3	Teri	731	1.563.385	1.143.177.500
4	Cakalang	3.575	162.162	579.724.000
5	Layur	2.102	115.412	242.615.000
6	Tuna	4.168	25.569	106.563.000
7	Kwee	4.459	87.618	390.700.500
8	Slengseng	3.086	6.510	20.090.000
9	Ekor Merah	2.335	21.986	51.331.000
10	Cucut	4.457	920	4.100.000
11	Selar	1.317	40.665	53.571.500
12	Pari	2.000	300	600.000
13	Panjo	1.490	2.215	3.300.000
14	Pogot	2.000	900	1.800.000
15	Kembung	3.000	2.992	8.976.000
16	Rebon	735	3.400	2.500.000
17	Lain-lain	1.610	5.214	8.392.000
Jumlah			7.944.441	15.348.536.000

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan 2007

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa jenis ikan terbanyak yang dilelang di TPI Prigi adalah Tongkol, Layang, dan Teri yang merupakan jenis ikan pelagis yang menjadi hasil tangkapan utama nelayan purse seine. Hal ini dikarenakan alat tangkap purse seine di Prigi mendominasi alat tangkap yang ada, yaitu sebanyak 120 unit dengan jumlah nelayannya sebanyak 2.875 orang.

Masyarakat pengguna TPI mempunyai kewajiban membayar retribusi 5% yang terdiri atas 3% dibebankan kepada pemilik ikan/nelayan dan 2% dibebankan kepada pembeli ikan. Adapun perkembangan retribusi dari TPI Prigi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Perkembangan Retribusi TPI Prigi Selama 5 Tahun

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2003	170.000.000	158.101.775	93,00
2004	185.000.000	187.810.015	101,52
2005	195.000.000	119.843.891	61,48
2006	225.000.000	311.705.757	138,54
2007	400.000.000	260.000.000	65,00

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek Tahun 2007

Target retribusi pelelangan ikan pada tahun 2007 sebesar Rp 400.000.000,- dengan realisasi perolehan retribusi pelelangan ikan sebesar Rp 260.000.000,- (65 %) dan telah disetor ke kas daerah. Pencapaian target penerimaan dari retribusi pelelangan ikan tahun 2007 tidak dapat tercapai dikarenakan hasil tangkapan ikan dari masing-masing armada penangkapan produksinya rata-rata relative lebih sedikit dibandingkan produksi tahun 2006. Selain itu, juga disebabkan karena kurang adanya kesadaran masyarakat nelayan untuk membayar retribusi pelelangan ikan.

## 5.2 Proses Pelelangan Ikan

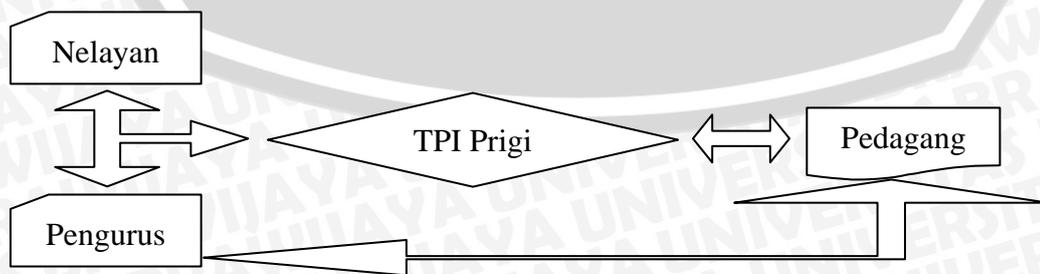
Tujuan penyelenggaraan TPI adalah : 1). Agar ada kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan/petani ikan maupun konsumen; 2). Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan; 3). Meningkatkan PAD; 4). Memberdayakan nelayan; 5). Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan; 6). Mengumpulkan data statistik perikanan.

Sistem pemasaran perikanan yang dilakukan di TPI Prigi pada dasarnya adalah sistem pelelangan. Sistem pelelangan ini memberikan peluang kepada nelayan untuk mengambil peran lebih dalam proses penentuan harga. Sedangkan bagi penjual, proses pelelangan ini memberikan kepastian tentang kualitas produk/ikan yang dilelang.

Untuk mengetahui proses pelelangan yang ada di TPI Prigi perlu dilakukan pendekatan sistem dalam mempelajarinya. Pendekatan sistem memberikan banyak manfaat dalam memahami lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dipandang dari sudut pandangan sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur yang membentuk sistem tersebut dan mengidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang membentuk sistem tersebut.

Walaupun di TPI Prigi proses pelelangan yang ditawarkan dalam penjualan hasil perikanan, tetapi tidak semua hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPN Prigi dilakukan pelelangan, hal ini biasanya tergantung alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Ikan tangkapan nelayan pancing dan gill net walaupun didaratkan di PPN Prigi, tetapi tidak dilakukan pelelangan, hal ini dikarenakan jumlah hasil tangkapan dari alat tangkap ini relatif sedikit jumlahnya, selain itu nelayan alat tangkap gill net dan pancing tersebut biasanya sudah memiliki pembeli/pedagang langganan yang akan menerima ikan hasil tangkapan mereka. Berbeda dengan penjualan ikan hasil tangkapan kedua alat tangkap tersebut. Ikan hasil tangkapan nelayan purse seine rata-rata dilakukan pelelangan di TPI Prigi.

Secara sederhana komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pelelangan hasil perikanan tengkap nelayan purse seine di TPI Prigi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 10. alur pelelangan di TPI Prigi

Alur pelelangan hasil perikanan tangkap nelayan purse seine di TPI Prigi secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu kegiatan pra lelang, proses pelelangan, dan pasca lelang.

#### a. Pra Pelelangan

Kegiatan ini diawali dari proses bongkar muat di pelabuhan hingga ikan sampai ke tempat pelelangan. Ikan diangkut ke TPI dengan cara dipikul 2 orang tukang pikul/*manol* menggunakan wadah keranjang yang dibuat dari bambu. Bayaran untuk kedua pemikul ini adalah Rp 5.000,-/keranjang. Ikan/keranjang sebelum dimasukan di tempat pelelangan, ikan ditimbang terlebih dahulu. Penimbangan ikan ini dicatat oleh petugas TPI (juru timbang) dalam karcis timbang dengan disaksikan oleh nelayan yang bersangkutan dan pengurus perahu/perwakilan pemilik perahu.

Setelah ikan ditimbang, selanjutnya ikan dimasukan ke tempat pelelangan ikan dan diberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk meneliti atau mengamati ikan yang akan dilelang, agar calon pembeli dapat menentukan harga yang dianggapnya sesuai dengan kualitas ikan. Calon pembeli sebelum ikut lelang harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada juru lelang sebagai peserta lelang.

Hal yang cukup menarik dan mengejutkan dari tahap pra lelang ini adalah banyaknya pihak-pihak diluar ABK yang seenaknya saja mengambil ikan yang ada di kapal atau bahkan ketika keranjang dipikul menuju tempat penimbangan. Faktor keamanan hasil tangkapan yang tidak terjamin ini cukup meresahkan pihak nelayan. Dari hasil diskusi dengan beberapa nelayan, ternyata hal inilah yang menyebabkan nelayan enggan untuk membayar retribusi pelelangan secara penuh sesuai dengan peraturan yang ada. Sebenarnya tentang keamanan hasil tangkapan nelayan yang mendarat ini pernah di

antisipasi dengan ditugaskan pihak keamanan di lingkungan TPI Prigi, tetapi hal ini tidak efektif, karena kurangnya dukungan dari sebagian nelayan juga.

Nelayan, khususnya pemilik perahu sangat menyayangkan terhadap realita yang ada tersebut. Hal ini seperti yang diutaran salah satu narasumber :

“Kami sangat menyesalkan terjadinya ketidak amanan hasil tangkapan kami waktu mendarat di TPI. Banyak pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam proses tersebut, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya, banyak pihak yang terlibat. Pemikul, saudara dari ABK atau bahkan orang-orang yang tidak dikenal turut mengambil. Hasil tangkapan itu mirip milik nenek mereka, mereka mengambil seenaknya saja tanpa memperdulikan bagaimana sulitnya usaha untuk membawa ikan dari tengah laut ke darat” (AS ,50 Th).

Selain keresahan itu dirasakan oleh pihak juragan, pihak penyelenggara TPI juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa dikambing hitamkan atas ketidak amanan hasil tangkapan nelayan, padahal pihak TPI telah melakukan usaha-usaha untuk mencegah ketidakamanan pendaratan hasil tersebut. Hal ini seperti diutarakan oleh salah satu narasumber :

“Begini Mas. Sebenarnya pihak TPI sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah hal tersebut (ketidakamanan ikan waktu didaratkan), tetapi pihak lainnya kurang mendukung (nelayan, pedagang dan pemikul). Pernah di TPI itu kami minta pihak Tentara, Polair untuk menjaga waktu ada pendaratan ikan, tapi ternyata kurang efektif, bahkan malah menambah biaya anggaran saja. Pernah kami tangkap dan kami tanya orang yang mengambil ikan. Setelah kami interogasi,eeee....., ternyata masih famili dari salah satu ABK perahu tersebut. Begini inilah susahny Mas. Sekarang keamanannya kami hanya tugaskan satpam saja, sekedar untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang dianggap sangat mengganggu” (S, 55 tahun).

## **b. Proses Pelelangan**

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau

dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat, (Kep. Men. Keu RI. No.337/KMK.01/2000 Bab.I, Ps.1). Lebih jelasnya lelang menurut pengertian tersebut adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi.

Kegiatan pelelangan di TPI Prigi dimulai dengan terlebih dahulu ikan diletakan di lantai TPI setelah ditimbang sebelumnya oleh juru timbang. Dengan menggunakan mikropon bermerk Toa, juru lelang memulai proses pelelangan ikan.

Secara sederhana, keadaan di lapang dapat dinarasikan sebagai berikut :

Juru Lelang : *"hallo...hallo....!"*

*Ulam rengis kagungane Sinar setunggal kilonipun dipun awes nem ewu rupiah, piantun bakul engkang bade ngersakne monggo....!"*

(hallo.....hallo....!

Ikan rengis/tongkol kepunyaan Sinar ditawarkan enam ribu rupiah, para bakul yang mau membeli silahkan.....!")

Dan ikan akan diberikan kepada calon pembeli yang menawar dengan harga paling tinggi. Proses tawar menawar ini biasanya hanya dilakukan secara informal saja, antara pihak pembeli dengan nelayan/pengurus. Juru lelang seakan-akan melelangkan hasil tangkapan, tetapi mereka hanya seperti petugas penimbang, penyiaran dan penarik retribusi.

Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, juru lelang menyiarkan hasil kesepakatan tadi dan dicatat oleh pihak loket dan diberikan faktur/karcis masing-masing untuk nelayan dan pembeli. Ikan yang sudah dibeli segera dibawa keluar dari TPI dengan faktur pembelian/karcis ikan keluar dari TPI.

Hasil Observasi yang cukup menarik dari proses pelelangan adalah di TPI tersebut pedagang dari luar kota seakan-akan diharamkan untuk ikut melakukan pelelangan. Apabila pedagang luar ingin membeli ikan di Prigi, ada ketentuan tidak tertulis bahwa mereka harus melalui perantara pedagang lokal. Hal ini juga terjadi bila mereka (pedagang Prigi) melakukan transaksi diluar Prigi. Sehingga harga yang terbentuk kurang optimal, karena dominasi kekuasaan pedagang lebih besar dari pada nelayan. Hal ini mirip dengan kondisi pasar Oligopsoni. Selain itu ada beberapa nelayan yang biaya operasionalnya ditanggung oleh pedagang, sehingga mau tak mau hasil tangkapan mereka harus dijual kepada pedagang yang memberikan/meminjamkan modal untuk operasional penangkapan.

Sebenarnya pedagang di TPI Prigi bukanlah *price maker* seperti yang diduga oleh mayoritas masyarakat. Mereka juga merupakan *price taker* seperti nelayan kebanyakan, walaupun tingkatannya berbeda. Pedagang yang ada di TPI Prigi dalam menentukan harga dasar penawaran biasanya didasarkan kepada harga ikan hari kemarin di Kawasan Sentra Konsumen (KSK) ditambah dengan kemungkinan resiko yang dihadapinya. Hasil dari keadaan yang demikian ini sangat melemahkan pihak produsen (nelayan) dikarenakan mereka benar-benar merupakan pihak yang tidak berdaya dalam menghadapi efek domino tersebut.

Semua pedagang menginginkan laba yang jumlahnya besar dan tidak ingin mengalami kerugian. Begitu juga nelayan, ingin mendapatkan pendapatan yang banyak dari hasil tangkapannya. Cara yang digunakan oleh pedagang untuk mencapai tujuannya tersebut adalah dengan cara menekan biaya pengeluaran (harga beli) serendah-rendahnya dan menjual produknya dengan harga tinggi. Sementara bagi nelayan, jalan untuk meningkatkan pendapatannya adalah dengan jalan memperbanyak ikan hasil tangkapannya, padahal hal ini tidak selalu linear.

### c. Pasca Pelelangan

Kegiatan pasca pelangan meliputi pengangkutan ikan hasil lelang ke tempat-tempat pembeli/pedagang, pembayaran terhadap harga yang disepakati, juga pembayaran retribusi yang dibebankan kepada penjual (nelayan) dan pembeli (pedagang) oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Perda Kabupaten Trenggalek No 28 Tahun 2002).

Setelah harga disepakati, maka ikan sudah menjadi milik pedagang. Selanjutnya ikan dibawa keluar oleh pembeli dengan menggunakan tukang pikul untuk dipindahkan ke mobil pick up/truck yang selanjutnya diangkut menuju tempat usaha masing-masing pedagang untuk diberi perlakuan khusus yang berhubungan dengan usahanya. Adakalanya ikan tadi dipandang, diberi es yang selanjutnya akan dijual dalam bentuk ikan segar, di jemur yang digunakan untuk bahan baku ikan asin atau sentrat, atau bahkan ada yang dijadikan tepung.

Proses pembayaran dari transaksi yang dilakukan di TPI Prigi tidak selalu terbayarkan secara kontan kepada nelayan. Sebagian besar pedagang dalam melakukan pembayaran dari pembelian ikan tersebut dilakukan dengan uang muka, dan sisanya dibayarkan beberapa hari setelah transaksi dilakukan. Tentunya hal ini tidak sesuai harapan dibangunnya TPI, yaitu agar nelayan cepat menerima uang hasil penjualan hasil tangkapannya (Hanafiah dan Saefudin, 2006).

Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002, retribusi TPI digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, yaitu orang atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi dipungut sebagai kompensasi atas pelayanan penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan ikan. Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat dan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilaksanakan di TPI. Subyek

retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas TPI sebagai sarana penyelenggaraan pelelangan ikan. Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan adalah sebesar 5% dari harga transaksi penjualan ikan yang terdiri dari 3% dipungut dari nelayan dan 2% dipungut dari pedagang.

Dari hasil penelitian di lapang, ternyata besarnya tarif 5% dari harga transaksi penjualan ikan tidak dipatuhi oleh nelayan dan pedagang. Pelanggaran peraturan ini diakui oleh nelayan, pedagang maupun pihak pengelola TPI. Retribusi 3% dari harga transaksi penjualan ikan, bagi nelayan terlalu memberatkan dan ini tidak sesuai dengan pelayanan pihak penyelenggara pelelangan, khususnya keamanan ikan hasil tangkapan mereka. Begitu juga bagi pedagang, TPI menurut mereka tidak sepatutnya menarik retribusi 2% dari harga transaksi pembelian mereka, hal ini tidak sesuai dengan pelayanan yang mereka berikan. Besarnya retribusi yang dibayarkan nelayan dan pedagang kepada TPI adalah sekehendak mereka. Pihak TPI sangat menyayangkan keluhan-keluhan yang dialamatkan oleh nelayan dan pedagang kepada mereka. Pelayanan yang diberikan oleh pihak TPI selalu maksimal walaupun kurang memuaskan bagi nelayan dan pedagang. Bagi pengelola TPI, bila penyelenggaraan TPI tidak didukung seluruh *stake holder* yang terlibat maka sulit untuk memenuhi harapan dan tujuan yang diharapkan.

### **5.3 Performance Usaha**

Performance usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh nelayan, usaha pemasaran yang dilakukan oleh pedagang ikan dan usaha yang dilakukan oleh TPI dalam melaksanakan usahanya. Penilaian dalam penentuan performance dari usaha yang dilakukan oleh nelayan dan pedagang ikan adalah dengan menggunakan perbandingan dari penerimaan dan biaya yang digunakan atau R/C ratio, juga

digunakan rentabilitas untuk mengetahui perbandingan antara laba yang diterima dengan modal investasi yang digunakan serta marketing efisiensi dari usaha yang dijalankan. Sedangkan penilaian dari performance TPI adalah dengan didasarkan atas laporan penerimaan retribusi TPI Prigi. Performance dari usaha-usaha tersebut adalah sebagai berikut :

### 5.3.1 *performance* usaha nelayan purse Seine

Nelayan Purse seine disini ada 2 macam, yaitu nelayan pemilik perahu yang biasanya disebut juragan darat dan nelayan yang menjalankan operasional penangkapan yang biasanya disebut nelayan dalam artian yang sebenarnya. Nelayan yang melakukan operasional penangkapan ini juga memiliki panggilan dan bagian upah yang berbeda-beda, tergantung pada jenis posisi pekerjaannya. Penanggung jawab pelaksanaan operasional penangkapan di laut adalah juragan laut sebagai juru mudi serta dibantu rata-rata 20 ABK (Anak Buah Kapal) lainnya.

Biaya operasional usaha penangkapan dengan alat tangkap purse seine di Pantai Prigi ditanggung oleh juragan darat. Biaya operasional ini meliputi BBM, biaya perawatan alat tangkap dan lain-lainnya. Biaya-biaya tersebut untuk sementara ditanggung oleh juragan darat. Bila penerimaan hasil tangkapan melebihi dari biaya operasional, maka sebagian pendapatan dipotong untuk biaya operasional, tetapi apabila pendapatan tidak mencukupi untuk biaya operasional, maka kerugian ditanggung oleh juragan darat. Biaya tetap dari usaha penangkapan dengan alat tangkap purse seine di Prigi terdiri atas penyusutan biaya investasi dan retribusi tambat labuh atas kapal yang dilabuhkan di PPN Prigi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6. Rata-rata biaya tetap perbulan dari masing-masing responden adalah sebesar Rp 3.401.250,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17. Perincian Besarnya Total Biaya Masing-Masing Responden Pada Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Bulan Juli 2008 (dalam rupiah)

Bentuk Biaya	1/Sinar	2/Mina Jaya	3/Arkanu	4/Nabila	5/Tirta Mina
Biaya tetap	3.254.583	3.379.583	3.629.583	3.421.250	3.321.250
Biaya tidak tetap	<b>29.343.350</b>	<b>42.095.000</b>	<b>28.827.000</b>	<b>28.610.667</b>	<b>25.035.000</b>
Jumlah	32.597.933	45.474.583	32.456.583	32.031.917	28.356.250
Total :	170.917.267				
Rata-rata :	<b>34.183.453</b>				

Sumber : Hasil Penelitian

Produksi rata-rata dari usaha ini pada bulan Juli 2008 adalah senilai Rp. 60.585.600,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 9. Sedangkan keuntungan, nilai R/C ratio dan nilai rentabilitas usaha ini dapat dilihat pada tabel 18 berikut :

Tabel 18. Perincian Perhitungan R/C Ratio Dan Rentabilitas Usaha Masing-Masing Responden Pada Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Bulan Juli 2008

Rincian/responden	1/Sinar	2/Mina Jaya	3/Arkanu	4/Nabila	5/Tirta Mina
Modal Investasi	328.300.000	311.300.000	363.300.000	338.300.000	332.300.000
Penerimaan	18.228.000	107.000.000	53.000.000	75.000.000	49.700.000
Total biaya	32.597.933	45.474.583	32.456.583	32.031.917	28.356.250
Laba/rugi	(-14.369.933)	61.525.417	20.543.417	42.968.083	21.343.750
Bag.pemilik (2/3)	(-14.369.933)	41.016.944	13.695.611	28.645.389	14.229.167
R/C Ratio	0,56	2,35	1,63	2,34	1,75
Margin Pemasaran	315.350	1.525.000	775.000	1.066.667	675.000
Rentabilitas	-4,38	19,76	5,65	12,70	6,42
<b>Mark-Up</b>	<b>1,73%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,36%</b>

Sumber : Hasil Penelitian

Dari keadaan seperti diatas dapat diketahui bahwa usaha purse seine di daerah penelitian adalah menguntungkan. Hal ini disebabkan di laut selatan yang merupakan laut yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia masih memiliki banyak sumber daya ikan, khususnya jenis ikan pelagis. Walaupun begitu, ada responden yang mengalami kerugian, yaitu pada KM. Sinar. Faktor keahlian dari sang nahkoda dan juga kekompakan ABK juga penting dalam

keberhasilan usaha ini, dan faktor itulah yang menyebabkan KM. Sinar mengalami kerugian.

R/C ratio rata-rata sebesar 1,73 dan ini berarti perhitungan R/C ratio lebih besar dari satu ( $R/C \text{ ratio} > 1$ ) menunjukkan bahwa usaha purse seine ini menguntungkan. Besarnya R/C ratio lebih besar dari satu tersebut disebabkan karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu tahun lebih kecil dari pada penerimaan yang diperoleh, sedangkan pada KM. Sinar hal tersebut adalah terbalik, sehingga R/C rasionya didapatkan 0,56 yang berarti usahanya mengalami kerugian. Sedangkan nilai efisiensi pemasaran yang terbaik adalah pada responden 5 dengan nilai sebesar 1,36%, yang berarti lebih efisien dibanding responden lainnya.

Bagi nelayan ABK, usaha penangkapan dengan alat tangkap purse seine lebih memberikan keuntungan dari pada dengan menggunakan alat penangkapan yang lain, walaupun ini memerlukan penelitian lebih lanjut tentang perbandingan usaha ini dengan usaha penangkapan dengan menggunakan alat penangkapan lainnya. Sebagaimana yang disampaikan beberapa responden, bahwa alat tangkap purse seine memiliki kemampuan menangkap ikan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan alat tangkap lainnya.

Bagi nelayan ABK, biaya-biaya operasional dalam usaha ini tidak terlalu dipikirkan, karena biaya operasional penangkapan untuk sementara ditanggung oleh pemilik perahu atau pedagang yang memiliki hubungan kerjasama dengan pemilik perahu. Nelayan ABK tidak mempunyai kewajiban untuk membayar biaya operasional ini. Apabila nilai hasil tangkapan dalam satu bulan ( $\pm 20$  trip) melebihi biaya operasional, maka pendapatan tersebut sebagian dipotong untuk biaya tersebut, apabila tidak mencukupi, maka biaya operasional ditanggung oleh pemilik perahu.

Biasanya biaya yang dikeluarkan oleh nelayan ABK dalam operasional penangkapan adalah biaya yang digunakan untuk membeli rokok ataupun makanan-makanan yang dibawa untuk camilan di laut. Sedangkan penerimaan yang diterima oleh nelayan ABK bermacam-macam yang terdiri atas:

- *Eseken/lawuhan* yang merupakan pendapatan utama ABK dalam setiap satu kali trip yang berupa ikan yang ditempatkan di kresek yang merupakan uang makan sehari-hari;
- Uang *njero* yang merupakan bagian uang yang diberikan sebesar 10% dari total nilai transaksi penjualan yang dilakukan di TPI. Nilai 10% ini dibagi per ABK per satu kali pelelangan.
- Uang totalan, uang ini dibagikan sebulan sekali dalam suatu forum mirip rapat anggota. Pada forum itu dipaparkan total biaya yang digunakan serta total pendapatan pada satu bulan dan juga dipaparkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan usaha ini.

Nelayan ABK secara langsung tidak terlibat dengan institusi TPI yang ada. Dalam hal pemasaran, keterlibatan mereka secara langsung adalah dengan pedagang-pedagang kecil yang biasanya disebut *pemapak* yang biasanya masih ada kekerabatan dengan mereka. *Pemapak* ini bertugas menjualkan ikan *esekekan* milik ABK dan selanjutnya mereka mengambil beberapa ribu dari hasil penjualan tersebut dengan meminta persetujuan dari ABK. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata biaya yang digunakan nelayan ABK dalam satu kali trip adalah Rp 14.000,- sedangkan total pendapatan bersih dalam satu bulan adalah Rp 2.190.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 10.

### 5.3.2 *performance* usaha pedagang

Pedagang ikan yang melakukan kegiatan usaha di TPI Prigi secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pedagang besar

dan pedagang kecil. Pedagang kecil yang disebut *pemapak* ini biasanya membeli *eseikan* dari nelayan ABK yang selanjutnya dijual kepada pedagang besar yang ada di TPI. sedangkan pedagang besar adalah pedagang yang membeli ikan hasil tangkapan dari kapal yang didaratkan dan dilelang di TPI ataupun ikan yang dijual pedagang kecil dan selanjutnya ikan tersebut dijual lagi baik melalui proses pengolahan selanjutnya yang berupa dipindang, diasinkan ataupun hanya diberikan perlakuan berupa peng-esa-n.

Permodalan para pedagang pada umumnya berasal dari modal sendiri, dan sebagian juga ada yang memperoleh pinjaman/kredit dari bank. Permodalan pedagang dibedakan menjadi modal investasi yang digunakan untuk keperluan penyediaan perlengkapan dan peralatan produksi dan modal yang digunakan untuk biaya operasional. Modal investasi yang digunakan pedagang antara lain pembelian cool box, terpal, timbangan dan alat transportasi sedangkan biaya operasional digunakan untuk pembelian ikan dan upah bagi karyawan. Bagi pedagang kecil (*pemapak*), modal investasi tidak terlalu penting, bahkan biaya operasional kadang kala tidak diperlukan, karena mereka seolah-olah hanya sebagai makelar penjualan ikan milik ABK kepada pedagang.

Disamping permodalan/biaya-biaya diatas, pedagang perlu menyediakan biaya cadangan diluar perhitungan tersebut. Biaya cadangan ini digunakan sebagai pengikat antara penjual (nelayan) dan pembeli (pedagang) dalam bentuk pinjaman baik pinjaman untuk kebutuhan biaya operasional kapal purse seine ataupun kebutuhan hidup sehari-hari nelayan ketika musim paceklik. Dengan adanya ikatan tersebut, pedagang berharap nelayan akan merasa hutang budi kepada pedagang dan mereka bersedia menjual hasil tangkapannya kepada pedagang. Hal ini dilakukan oleh pedagang besar maupun pedagang kecil (*pemapak*) yang tidak ada ikatan kekeluargaan dengan ABK *papakannya*.

Produksi yang dihasilkan oleh pedagang terdiri atas beberapa jenis, baik berupa ikan segar maupun ikan olahan dan ikan kering. Daerah pemasaran pedagang dari Pantai Prigi meliputi Trenggalek, Tulungagung, Surabaya, Malang, Jombang, Banyuwangi, Kediri, Nganjuk, Bali dan Madiun. Ikan segar dengan peng-es-an biasanya meliputi jenis ikan layang, kembung, sedangkan produk olahan/pindang sebagian besar dari jenis ikan tongkol.

Besarnya biaya investasi rata-rata pedagang besar adalah sebesar Rp 46.666.667,- sedangkan bagi *pemapak* tidak memperhatikan biaya investasi ini. Sedangkan rata-rata total biaya yang digunakan pedagang pada bulan Juli 2008 adalah Rp 21.437.486,-, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 13, sedangkan keuntungan, nilai R/C ratio dan nilai rentabilitas usaha ini dapat dilihat pada tabel 19 berikut :

Tabel 19. Perincian Perhitungan R/C Ratio Dan Rentabilitas Usaha Masing-Masing Responden Pada Pedagang Ikan Hasil Perikanan Tangkapan Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Bulan Juli 2008

Uraian	Responden				
	Partiyah	Siti Khotijah	Dadang	Wiji	Suratin
Modal Investasi	0	0	35.000.000	50.000.000	55.000.000
Penerimaan	3.850.000	1.615.000	33.750.000	54.000.000	77.950.000
Total biaya	3.316.500	1.378.150	22.050.000	31.400.000	44.250.000
Laba/rugi	533.500	236.850	11.700.000	22.600.000	33.700.000
R/C Ratio	1,16	1,17	1,53	1,72	1,76
Margin Pemasaran	29.000	16.150	775.000	1.532.500	1.405.000
Rentabilitas	#DIV/0!	#DIV/0!	33,43	45,20	61,27
Mark -Up	0,75%	1,00%	2,30%	2,84%	1,80%

Sumber : Hasil Penelitian

R/C ratio rata-rata sebesar 1,47, ini berarti perhitungan R/C ratio lebih besar dari satu (R/C ratio >1) menunjukkan bahwa usaha perdagangan ikan ini menguntungkan. Besarnya R/C ratio lebih besar dari satu tersebut disebabkan karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu tahun lebih kecil dari pada penerimaan yang diperoleh. Nilai R/C ratio tertinggi diketahui pada usaha Ibu

Suratin dengan nilai R/C rasionya didapatkan 1,76, yang berarti usahanya mengalami keuntungan lebih bila dibandingkan lainnya. Hal ini disebabkan Ibu Suratin menggunakan strategi jaringan pemasaran yang cukup luas, sehingga produksinya dapat terjual dengan harga lebih bila dibandingkan yang lainnya. Sedangkan nilai efisiensi pemasaran yang tertinggi adalah pada responden 1, Ibu Wiji dengan nilai efisiensi pemasaran sebesar 2,84%, yang berarti kurang efisien dibanding responden lainnya, hal ini dikarenakan terlalu banyaknya tenaga kerja yang digunakan serta harga penjualan ikan yang relatif rendah.

### **5.3.3 performance usaha instansi TPI**

Penilaian performance dari UPTD TPI Prigi adalah dengan melihat Laporan Perolehan Retribusi tahun 2005, 2006, 2007, dan selama bulan Juli 2008. salah satu tujuan penyelenggaraan TPI adalah untuk meningkatkan PAD. Sesuai Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002, besarnya tarif retribusi dari pemanfaatan TPI adalah 5% dari harga transaksi. Oleh sebab itu, banyak sedikitnya jumlah produksi perikanan yang dilelang di TPI Prigi berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Trenggalek.

Usaha yang dilakukan TPI dalam hal melayani masyarakat nelayan adalah dengan menyelenggarakan pelelangan hasil tangkapan nelayan. Proses pelelangan ini meliputi penimbangan dan pelelangan. Tetapi didalam pelaksanaannya hingga penelitian ini dilakukan, pemasaran dengan sistem pelelangan ini tidak terlaksana dengan baik, hal ini juga diakui oleh nelayan, pedagang, maupun petugas TPI. Sehingga kegiatan dari TPI yang paling utama adalah melakukan penimbangan dari hasil penangkapan nelayan yang akan dijual kepada pedagang.

Mengingat pelayanan yang dilakukan tidak memenuhi harapan dari nelayan maupun pedagang, maka pedagang maupun nelayan sulit untuk

memenuhi pembayaran retribusi sebesar 5% tersebut. Keamanan pendaratan ikan serta proses pelelangan yang memprihatinkan adalah pemicu utama keengganan mereka untuk memenuhi pembayaran retribusi 5% tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada laporan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan (UPTD-TPI Prigi) bulan Juli 2008. Pada bulan Juli 2008 total produksi yang dilelang di TPI Prigi adalah sebanyak 1.538.056 Kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 2.872.769.000,-, bila sesuai prosedur yang benar bahwa retribusi yang diterima adalah sebesar 5% dari total nilai transaksi, maka nilai pendapatan retribusi dari TPI ini adalah senilai Rp. 143.638.450,- tetapi kenyataan yang diterima adalah sebesar Rp. 37.580.000,- berarti terdapat selisih nilai sebesar Rp. 106.058.450,-. Untuk lebih jelasnya total produksi ikan yang dilelang TPI Prigi pada bulan Juli 2008 dapat dilihat pada lampiran 15.

TPI Prigi merupakan TPI yang dibangun bersamaan dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi pada tahun 2004 yang sebelumnya berstatus Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). karena TPI Prigi pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi, maka pemanfaatan retribusi nilai total 5% diatas, dapat dibagi masing-masing sebesar 0,5% untuk Pusat/Propinsi; 1,5% untuk Pemerintah Kabupaten dan 3% untuk penyelenggaraan pelelangan ikan. Penyelenggaraan pelelangan tersebut digunakan untuk pembiayaan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan terhadap nelayan dan bakul yang melakukan pelelangan di TPI Prigi. Untuk lebih jelasnya perincian alokasi retribusi pada tahun 2007 dan bulan Juli 2008 dilihat pada tabel 20 dibawah ini:

Tabel 20. Tabel Perincian Perolehan Retribusi TPI Tahun 2007 dan Bulan Juli 2008

No	Uraian	5%	Alokasi Dana (Rp)	
			2007	Juli 2008
	Pendapatan		260.000.000	37.580.000
1	Tingkat I	0,50	26.000.000	3.758.000
2	Tingkat II	1,50	78.000.000	11.274.000
3	Biaya Lelang			
	- Gaji Karyawan	1,20	62.400.000	9.019.200
	- Ongkos Kantor	0,30	15.600.000	2.254.800
	- Perawatan	0,20	10.400.000	1.503.200
4	Kesra			
	- Dana Kecelakaan	0,20	10.400.000	1.503.200
	- Dana Paceklik	0,20	10.400.000	1.503.200
	- Dana Sembonyo	0,10	5.200.000	751.600
5	Dana Pendidikan	0,10	5.200.000	751.600
6	Peng. Kelembagaan	0,05	2.600.000	375.800
7	PAD Desa	0,05	2.600.000	375.800
8	Pengawasan	0,30	15.600.000	2.254.800
9	Pembinaan	0,20	10.400.000	1.503.200
10	Pemupukan Modal	0,10	5.200.000	751.600
	Jumlah	5,00	260.000.000	37.580.000

Sumber : Laporan Perolehan Retribusi TPI Prigi, 2008

Dari gambaran data diatas, kita dapat melihat bahwa dana 3% oleh pihak TPI digunakan untuk berbagai pos alokasi. Selanjutnya dengan melihat jumlah pegawai TPI Prigi yang berjumlah 20 orang, yaitu 13 pegawai tetap dan 7 PNS, maka secara sederhana honor yang didapat pegawai TPI pada bulan Juli 2008 adalah sebesar Rp 450.950,- sedangkan pada tahun 2007 honor karyawan adalah rata-rata sebesar Rp 260.000,-. Honor karyawan TPI Prigi perbulan tidak selalu sama, tergantung total pendapatan retribusi yang diterima. Seperti yang diutarakan beberapa karyawan TPI Prigi, bahkan ketika musim paceklik, honor yang mereka terima sangat minim.

#### 5.4 Tingkat Kelayakan TPI

Untuk menyelenggarakan proses pelelangan ikan yang sesuai dengan tujuan pendiriannya, maka proses pelelangan tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karenanya pengakajian terhadap kelayakan fungsional maupun kelayakan teknis secara holistik sangat diperlukan.

##### 5.4.1 Kelayakan Teknis

Hasil observasi di lokasi penelitian yang dilakukan selanjutnya akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Kedua sistem diatas akan digabungkan melalui sistem skoring (pemberian nilai masing-masing kategori). Dasar penilaian adalah dengan mengacu pada perbandingan di literatur-literatur dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan adanya analisa ini, nantinya akan dapat menjawab sampai sejauh mana tingkat kelayakan TPI Prigi sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pemasaran hasil perikanan.

Secara teknis kondisi Tempat Pelelangan Ikan Prigi dari hasil observasi dan wawancara dapat diketahui kondisi TPI seperti yang ada dalam tabel berikut

Tabel 21. Tabel Kelayakan TPI Prigi Secara Teknis

No.	Hasil Observasi	Kriteria Nilai	Bobot
1.	Konstruksi <b>Kemiringan lantai</b> TPI $\geq 0,2$ %. Dimana hal ini mengakibatkan lancarnya aliran air di lantai TPI, sehingga terlihat lantai TPI bersih karena lebih mudah dalam membersihkannya.	B	3
2.	<b>Penerangan</b> yang tersedia di sekitar TPI sudah tersedia dengan cukup. Pendaratan ikan di TPI yang tidak mengenal waktu, baik siang maupun malam tidak ada kendala tentang penerangannya.	B	3
3.	<b>Ketersediaan air bersih</b> di TPI Prigi dirasa masih kurang sehingga kurang bisa digunakan oleh para pengguna jasa lelang. Para nelayan dan pedagang yang membutuhkan air harus mengambil air langsung dari laut menggunakan ember sendiri.	S	2
4.	<b>Drainase</b> dalam kondisi baik, berfungsi lancar	B	3
5.	Bahan pembuatan <b>Dinding dan lantai</b> TPI terbuat dari semen biasa, walaupun sebagian dindingnya terlapisi keramik putih	S	2
6.	<b>Timbangan</b> yang tersedia cukup, yang terdiri atas 2 timbangan digital dan 3 timbangan konvensional	B	3
7.	<b>Bak Sampah</b> kurang ada, <b>pagar pembatas</b> dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik, daftar harga ikan dan gambar jenis-jenis ikan ada di dalam ruang petugas TPI	B	3
<b>Total Bobot</b>			<b>19</b>

Sumber : Hasil Penelitian, 2008

Keterangan : (B) : Baik (K) : Kurang (S) : Sedang

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa jumlah total skor/kriteria penilaian kelayakan TPI Prigi adalah 19, dalam arti secara teknis kondisi TPI Prigi termasuk kriteria 90,48% bagus (nilai total skor  $>14,5$ ). Hal ini tentu saja sangat masuk akal, karena TPI Prigi termasuk satu paket pembangunannya dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang termasuk kelas B dalam standar nasional.

#### 5.4.2 Kelayakan Fungsional

Dari hasil observasi di lapang didapatkan data tentang tingkat kelayakan TPI Prigi secara fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Tabel Kelayakan TPI Prigi Secara Fungsional

No.	Unsur yang dinilai	Kriteria Nilai	Bobot
1.	<b>Daya tampung TPI</b> adalah >70% dari total ikan yang didaratkan, hal ini karena di TPI Prigi tersedia 2 tempat pelelangan dan 3dermaga pendaratan yang cukup luas sebagai tempat antrian pelelangan apabila hasil produksi ikan sangat melimpah.	B	3
2.	<b>Fungsi penimbangan</b> berjalan dengan baik walaupun kadang-kadang ketika produksi ikan melimpah, khususnya ikan teri ( <i>Sardinella longicep</i> ) tidak dilakukan penimbangan dikarenakan produksinya melimpah sehingga penjualanya dengan system borongan per keranjang	S	2
3.	<b>Data-data statistik</b> yang tersedia di TPI Prigi akurasi datanya sebesar 40% - 70%. Kurang akuratnya data tersebut dikarenakan peraturan-peraturan yang dibuat tidak dilaksanakan secara konsekwen. Rancunya data tersebut terbukti dengan adanya beberapa perbedaan data yang diperoleh dari PPN Prigi dengan TPI Prigi.	S	2
4.	Salah satu fungsi TPI adalah <b>pembinaan mutu hasil perikanan</b> . Ada beberapa cold box yang tersedia di TPI Prigi yang merupakan bantuan pemerintah kepada pemerintah, tetapi cold box tersebut kurang tersampaikan kepada nelayan dikarenakan dikhawatirkan timbul kecemburuan social dikarenakan jumlahnya sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah nelayan yang ada.	K	1
5.	<b>Sistem pembayaran</b> yang digunakan di TPI Prigi tidak seperti apa yang diharapkan dengan tujuan awal TPI. Pembayaran kontan tidak terealisasi dengan baik. Pembayaran umumnya dilakukan 1sampai 3 hari, bahkan kadang lebih.	K	1
6.	Di TPI Prigi walaupun sistem pelelangan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi <b>Harga yang terbentuk</b> cukup layak bila dilihat dari sudut pandang ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari fluktuasi jumlah ikan yang didaratkan di Prigi dengan harga yang terbentuk. Harga yang terbentuk bukan merupakan harga kesepakatan antara nelayan dengan pedagang dengan pertimbangan jumlah keseluruhan ikan yang didaratkan di TPI Prigi.	S	2
7.	Fungsi TPI sebagai <b>Sumber PAD</b> kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Retribusi 5% dari nilai lelang tidak berjalan dengan baik dikarenakan berbagai faktor, baik faktor teknis maupun non teknis. Bila faktor-faktor tersebut dapat teratasi maka TPI Prigi sebagai salah satu sumber PAD dapat terealisasi sesuai yang diharapkan.	S	2
<b>Total Bobot</b>			<b>13</b>

Sumber : Hasil Penelitian, 2008

Keterangan : (B) : Baik (K) : Kurang (S) : Sedang

Analisis kelayakan fungsi TPI dilakukan untuk mengukur/mengetahui tingkat kelayakan fungsi penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI Prigi. Pada pendekatan ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Adapun tingkat kesesuaian data yang dievaluasi antara landasan teori dengan masalah sebenarnya yang ada di lapang. Berdasarkan analisis fungsi TPI dengan menggunakan parameter penyediaan sarana, penyediaan data-data statistik perikanan, pembinaan mutu hasil perikanan, sistem dan kelayakan pembentukan harga dan fungsi TPI sebagai sumber PAD, dapat diperoleh total nilai 13 dan ini artinya bahwa TPI Prigi 61,90% berfungsi sesuai dengan harapan atau tingkat kelayakan TPI secara fungsional termasuk sedang.

Bila kita melihat perbandingan antara tingkat kelayakan teknis dan tingkat kelayakan fungsional TPI Prigi akan kita dapatkan perbedaan nilai skor 6 atau 28,58%. Perbedaan nilai ini adalah cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kawasan Pantai Prigi kedepan sebagai daerah sentra perikanan tangkap. Secara sederhana dapat kita ketahui penyebab tingkat kelayakan fungsional TPI Prigi yang kurang maksimal, diantaranya : SDM di lembaga pemasaran TPI masih kurang, Manajemen TPI yang masih rancu, Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat nelayan, serta perlu terobosan baru tentang mekanisme penentuan harga yang lebih representatif.

### **5.5 Persepsi dan Hubungan Antara Nelayan, Pedagang Dan Pihak TPI**

Menurut Rogers dan Shoemoeker dalam Susilo (1986), Diffusi inovasi mempunyai pengaruh timbal balik dengan struktur sosial. Setiap strata berusaha mempertahankan dan atau meningkatkan struktur sosialnya atas dasar kepentingan masing-masing. Untuk mengetahui hubungan antara nelayan, pedagang dan pihak TPI dapat kita dekati dengan analisis menggunakan teori

difusi inovasi. Indikator utamanya adalah dengan menganalisis keuntungan relatif dari masing-masing pihak yang terkait dengan pendekatan deskriptif.

### 5.5.1 Hubungan antara nelayan dengan pedagang

Persepsi hubungan antara nelayan dengan pedagang adalah beragam dari satu orang dengan orang lain. Persepsi hubungan ini dinyatakan dengan hal-hal yang menyangkut masalah penyediaan modal, pemasaran hasil tangkap dan kesejahteraan yang diperoleh oleh nelayan ataupun pedagang.

Bagi nelayan, keberadaan pedagang sangat mempengaruhi proses penangkapan ikan yang mereka peroleh, baik berupa permodalan maupun pemasaran hasil tangkapan mereka. Keberadaan pedagang bagi nelayan pada saat tertentu sangat menguntungkan. Ketika nelayan memerlukan modal segar dan cepat untuk digunakan sebagai biaya penangkapan, maka solusi yang tepat dan cepat adalah pedagang. Pedagang selalu dengan tangan terbuka memberikan pinjaman kepada nelayan tanpa persyaratan yang rumit seperti lembaga perbankan pada umumnya. Dengan modal kepercayaan mereka memberikan pinjaman kepada nelayan dengan syarat tertentu. Biasanya syarat ini adalah berkaitan tentang penjualan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Syarat ini biasanya tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis, tapi cukup saling menjaga kepercayaan. Bahkan walaupun nelayan melakukan pinjaman uang kepada pedagang bukan untuk modal melaut, tetapi untuk biaya kebutuhan sehari-hari tetap mereka usahakan untuk diberi pinjaman. Pedagang dalam hal ini secara tidak langsung mencoba menanamkan rasa ketergantungan (*patronase*) nelayan kepada mereka. Penanaman sifat *patronase* ini menyebar secara umum di tiap level di lokasi penelitian. *Pemapak* terhadap nelayan ABK ataupun pedagang besar terhadap juragan darat.

Melihat kenyataan yang ada tersebut (budaya Patronase), pedagang memiliki peluang untuk menyelewengkan kekuasaannya. Pedagang seakan berkuasa atas nelayan dan sangat berpeluang untuk menekan dan mengeksploitasi nelayan yang mengalami ketergantungan kepada mereka. Jalan satu-satunya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menguasai pemasaran hasil tangkapan nelayan. Bagi nelayan, harga ikan hasil tangkapan mereka tidaklah terlalu rendah ketika total tangkapan seluruh nelayan sedikit, tetapi ketika total tangkapan nelayan banyak, mereka sangat menyesalkan harga yang mereka terima sangat rendah. Bagi pedagang, hal itu memang umum dan sesuai hukum penawaran maupun hukum permintaan. Menurut pedagang, dalam melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan mereka tidak berusaha untuk mempermainkan harga yang ada, tetapi keadaan global yang mempengaruhi harga sejalan dengan perkembangan teknologi. Bagi mereka, ketika mereka mempermainkan harga yang diterima nelayan, maka nelayan akan memberontak dan tidak mau melakukan kerjasama dengan mereka.

Pedagang dalam melihat nelayan bukan sebagai mangsa yang akan dimangsa, tetapi lebih sebagai partner kerja. Dengan adanya aktifitas penangkapan ikan tersebut, maka mereka bisa melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk pemasaran ikan. Faktor inilah yang mendorong pedagang untuk menjaga hubungan baik dengan nelayan dengan menanamkan hubungan *patron-client*.

### **5.5.2 Hubungan antara nelayan dengan TPI**

Bagi nelayan khususnya nelayan tradisional, keberadaan TPI merupakan keadaan yang baru. Melihat kehadiran TPI yang relatif baru bila dibandingkan dengan kegiatan perikanan di Indonesia, mengharuskan TPI sebagai sebuah inovasi untuk “bernegosiasi” dengan kebudayaan yang ada dimasyarakat,

khususnya masyarakat nelayan. Tugas utama TPI adalah menjualkan hasil tangkapan nelayan dengan sistem pelelangan. Dalam sistem ini banyak hal yang berbeda (gedung, timbangan, karcis, pengeras suara, retribusi) dari sebelumnya yang apabila nelayan pulang melaut hasil tangkapannya langsung dijual ke pedagang

Bila dilihat tujuan awal dibangunnya TPI, maka secara kasat mata pihak yang paling diuntungkan adalah nelayan. Hal ini karena di TPI diharapkan sistem pelelangan menempatkan nelayan berada pada posisi yang tidak dieksploitasi lagi oleh pedagang. Dengan adanya penjualan dengan sistem lelang, pendapatan yang diterima nelayan akan lebih besar dan secara kontan. Posisi TPI membela kepentingan nelayan dalam melakukan pelayanan. Pengelolaan dana retribusi juga digunakan untuk kesejahteraan dan pembinaan nelayan.

Kenyataan dilapangan ternyata jauh dari harapan yang ada. Bagi Nelayan, TPI tidak ubahnya hanya sebagai penimbang dan penarik retribusi. Fungsi TPI lainnya tidak mereka rasakan. Proses pelelangan yang ditawarkan ternyata tidak ada kenyataannya. Harga yang terbentuk tidak melalui tawar menawar harga dalam bentuk lelang, dan ini berpengaruh terhadap harga yang terbentuk. Selain itu keamanan ikan hasil tangkapan di TPI tidak dijamin oleh pihak pengelola TPI. Ketika ikan didaratkan, banyak pihak-pihak yang tidak berhak mengambil ikan hasil tangkapan nelayan dan secara otomatis merugikan pihak nelayan. Pengelolaan retribusi yang dipandang kurang transparan juga disayangkan oleh nelayan. Mereka merasa bahwa sesungguhnya mereka hanya dimanfaatkan untuk penarik retribusi.

Maksud dan tujuan TPI untuk mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen ternyata tidak dapat terlaksana. Kekuatan harga tetap berada di tangan pedagang. TPI tidak bisa diidentikan dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) dengan menetapkan harga terendah ataupun

harga tertinggi ataupun melakukan pembelian. Keadaan seperti ini yang menjadikan ambigu peran TPI tersebut. Seperti diutarakan oleh responden dari pihak TPI Prigi sebagai berikut :

”TPI tidak bisa menentukan harga ikan harus terendah segini atau tertinggi segitu. TPI itu tidak ada kewajiban untuk membeli ikan. Mengenai harga awalan sebagai informasi dasar harga yang digunakan di TPI adalah dengan mengacu informasi dari BTS yang diterima TPI, dan harga yang terbentuk di TPI bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah”

### **5.5.3 Hubungan antara Pedagang dengan TPI**

Bagi Pedagang, TPI merupakan institusi yang akan merebut ladang bisnisnya. Mereka beranggapan dengan adanya TPI, maka posisi mereka sebagai patron/orang tua asuh akan tereduksi. Hal ini otomatis akan mengakibatkan keuntungan yang mereka peroleh akan berkurang. Oleh sebab itu, pedagang akan berusaha mempertahankan posisinya dengan jalan mencari kelemahan-kelamahan yang terdapat pada sistem penjualan lewat pelelangan di TPI ini dan juga faktor-faktor lain yang berkaitan dengan TPI. Apabila mereka telah menemukan titik lemah tersebut, maka usaha posisi mereka akan lebih kuat bila dibanding sebelumnya, hal ini sebagai bentuk anti klimaks.

Kurangnya maksimal fungsi pelelangan yang ditawarkan pihak TPI juga sangat disesalkan oleh sebagian pihak pedagang. Karena kurang maksimalnya fungsi pelelangan tersebut sehingga seakan-akan ada kekuatan-kekuatan kelompok yang memainkan harga di TPI tersebut. Keadaan ini mirip dengan keadaan pasar Oligopsoni, dimana ada 3 atau lebih pembeli yang menguasai pasar, sehingga harga ada ditangan mereka. Bagi pedagang yang tidak masuk dalam lingkaran ini maka sangat memprihatinkan, karena mereka akan mengalami tekanan yang pada akhirnya merugikan usaha mereka.

Retribusi sebesar 2% yang harus dibayarkan pedagang kepada TPI juga tidak berjalan secara maksimal. Bagi mereka fungsi dan pelayanan TPI yang

tidak memuaskan sebagai pemicu keengganan mereka untuk membayar retribusi secara penuh. Selain itu adanya kecurigaan pada pihak TPI dalam pengelolaan retribusi yang kurang transparan juga menjadi faktor pemicu keengganan tersebut.



## 6 KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektifitas dan efisiensi sistem pelelangan hasil perikanan tangkap nelayan purse seine di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemasaran hasil perikanan tangkap nelayan purse seine di Pantai Prigi dilakukan di TPI Prigi. Sistem pemasaran tersebut meliputi kegiatan Pra lelang, lelang dan pasca lelang. Pra lelang meliputi pendaratan ikan di pelabuhan, pengangkutan ikan ke TPI sampai penimbangan ikan. Kegiatan lelang mulai dari pihak TPI mengumumkan keadaan ikan yang akan dijual serta penawaran pertama harga oleh pihak TPI sampai dengan kesepakatan harga. Sedangkan pasca lelang meliputi pembayaran uang transaksi pelelangan, pembayaran retribusi sampai dengan pengangkutan ikan keluar dari TPI. Keadaan yang memprihatinkan dari sistem pemasaran di TPI Prigi adalah sistem keamanan terhadap hasil perikanan yang akan dilelang serta proses pelelangan yang kurang transparan (lelang semu).
2. Tingkat efektifitas TPI Prigi termasuk bagus. Tingkat efektifitas TPI Prigi adalah 76,19%, hal ini dapat diketahui dengan cara melihat dua parameter yang digunakan, yaitu kelayakan secara teknis maupun secara fungsional dari TPI Prigi. Tingkat kelayakan TPI Prigi secara teknis adalah termasuk bagus. Total skor/kriteria penilaian kelayakan TPI Prigi adalah 19, dalam arti secara teknis kondisi TPI Prigi termasuk kriteria 90,48% bagus (nilai total skor >14,5). Hal ini tentu saja sangat masuk akal, karena

TPI Prigi termasuk satu paket pembangunannya dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang termasuk kelas B dalam standar nasional. Sedangkan tingkat kelayakan TPI Prigi secara fungsional termasuk sedang. Dari parameter yang digunakan diperoleh total nilai 13 dan ini artinya bahwa TPI Prigi 61,90% berfungsi sesuai dengan harapan atau tingkat kelayakan TPI secara fungsional termasuk sedang.

3. Tingkat efisiensi sistem pelelangan ikan di TPI Prigi bagi nelayan, pedagang, dan pihak penyelenggara TPI Prigi adalah heterogen. Nilai Margin Pemasaran (*Mark Up*) dari nelayan adalah rata-rata sebesar 1,48% dengan nilai paling tinggi ada pada KM Nabila sebesar 2,34% sedangkan yang paling rendah ada pada KM Sinar sebesar 0,56%. Sedangkan bagi pedagang, Nilai Margin Pemasaran (*Mark Up*) adalah rata-rata 1,74%. dengan nilai paling tinggi ada pada Ibu Wiji dengan nilai sebesar 2,84% sedangkan yang paling rendah ada pada Ibu Suratin dengan nilai sebesar 1,80%. Bagi pengelola TPI, sistem pelelangan di TPI Prigi kurang efisien, hal ini dikarenakan perolehan retribusi yang diterima TPI tidak sesuai dengan peraturan yang ada (5% dari total nilai transaksi yang dilakukan) yaitu sebesar Rp. 260.000.000 (seharusnya Rp. 767.426.800) dari total nilai produksi sebesar Rp.15.348.536.000 pada tahun 2007 dan pada bulan Juli 2008 sebesar Rp. 37.580.000 (seharusnya Rp. 143.638.450) dari total nilai produksi sebesar Rp. 2.872.769.000.

4. Persepsi nelayan, pedagang, maupun pengelola TPI sendiri terhadap fungsi TPI kurang memuaskan. Bagi nelayan, fungsi TPI sebagai penyelenggara pelelangan sekaligus pengontrol stabilitas harga ikan tidak terlaksana dengan baik, bahkan keamanan ikan hasil tangkapan mereka yang didaratkan di TPI Prigi juga kurang terjamin, sementara TPI

menuntut agar retribusi dibayarkan secara penuh. Sedangkan pedagang menilai bahwa TPI Prigi belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan profesional. Sistem pelelangan yang ditawarkan di TPI Prigi tidak berjalan secara murni sehingga yang terjadi adalah mirip dengan pasar oligopsoni dimana ada kongsi-kongsi antara beberapa pedagang yang menguasai harga di TPI Prigi. Bagi penyelenggara TPI, kurang maksimalnya fungsi TPI Prigi bukanlah semata-mata karena kesalahan pihak penyelenggara *an sich*. Kurang maksimalnya fungsi TPI adalah karena kurangnya dukungan dari *stakeholder* yang terlibat dalam sistem pelelangan secara integral.

5. Hubungan antara nelayan dan pedagang adalah merupakan hubungan partner kerja, walaupun apabila dilihat lebih detail ada semacam hubungan *patron-client*. Secara umum, usaha pedagang untuk mengikat nelayan agar mereka mau dan tetap menjual ikan tangkapannya adalah dengan cara memberikan perhatian kepada nelayan dalam bentuk memberikan pinjaman kepada nelayan, baik berupa pinjaman untuk biaya operasional penangkapan maupun untuk biaya kehidupan sehari-hari. Hubungan antara nelayan, pedagang dengan TPI adalah kurang harmonis. Menurut nelayan dan pedagang, pihak TPI kurang profesional dalam menjalankan fungsinya serta kurang transparan dalam pengelolaan retribusi yang diterima, di lain sisi mereka menuntut untuk dibayarkan secara penuh retribusi sebesar 5%.

## 6.2 Saran

Dari hasil kegiatan penelitian di wilayah perairan Prigi Kabupaten Trenggalek ini, maka disarankan untuk:

1. Terhadap pengelola TPI Prigi perlu adanya peningkatan pengelolaan sistem pelelangan secara profesional (keamanan hasil tangkap,

ketertiban pengunjung TPI dan administrasi pelelangan) yang meliputi pra pelelangan, proses pelelangan dan pasca pelelangan sehingga fungsi penyelenggaraan TPI dapat berjalan semaksimal mungkin.

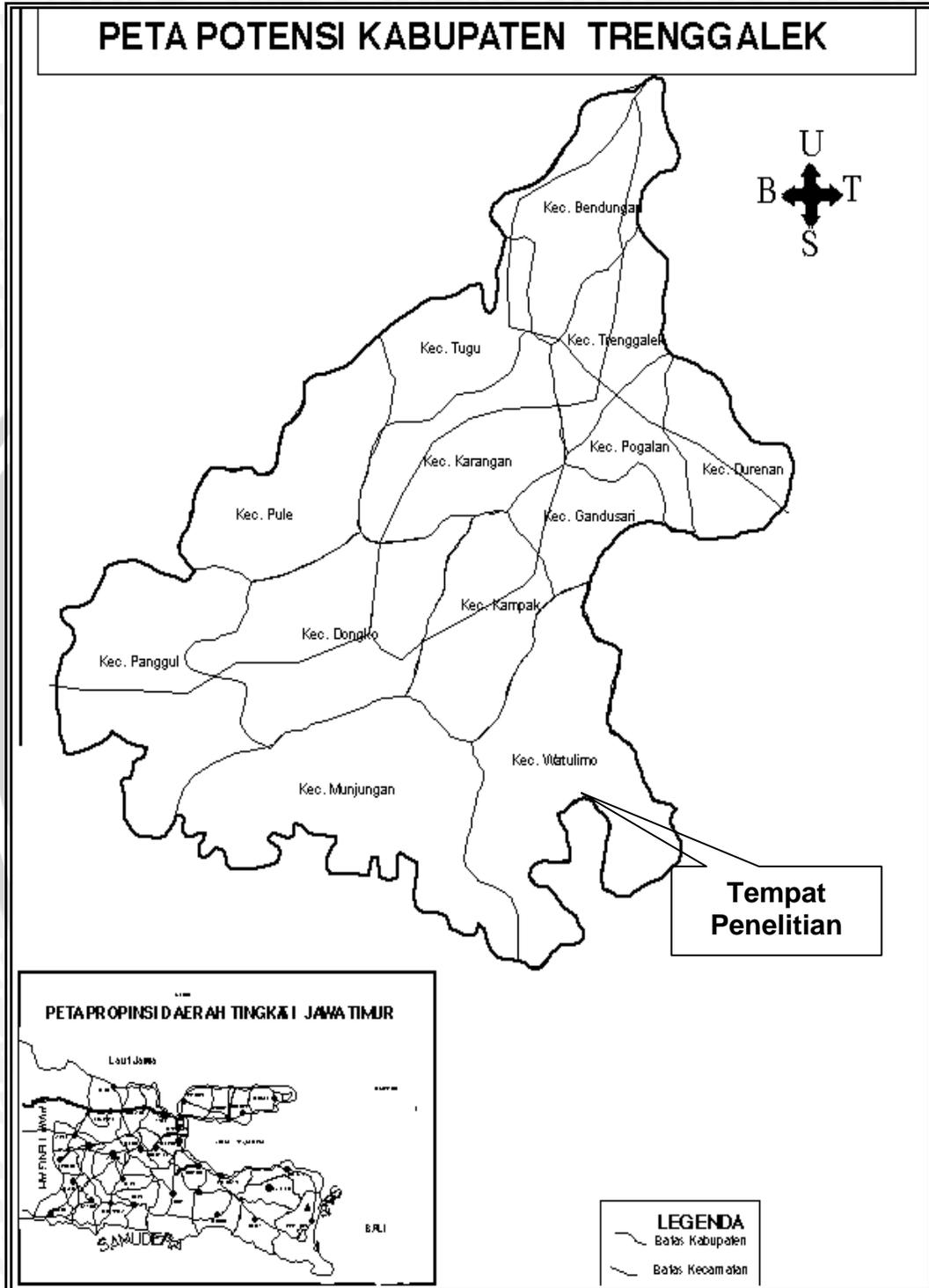
2. Perlu adanya forum bersama antara nelayan, pedagang dan pengelola TPI tentang bagaimana manfaat dan fungsi TPI bagi rantai pemasaran hasil perikanan serta langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kesepakatan yang ada dari forum tersebut sehingga persepsi negatif dan rasa saling curiga akan tereduksi.
3. Perlu adanya kredit lunak dan mudah prosesnya yang disediakan kepada nelayan guna mengurangi ketergantungan (*patron-client*) mereka kepada pedagang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan usaha mereka.
4. Perlu adanya peningkatan SDM baik kepada nelayan, pedagang maupun petugas TPI dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing (pelatihan *fish handling* /pelatihan manajemen) ataupun meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pesisir agar lebih mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada secara kompetibel.
5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun pihak akademisi sehingga diperoleh inovasi baru yang lebih solutif dan aplikatif dalam memecahkan permasalahan TPI secara umum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. 2005. *Analisis Sistem Tataniaga Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Pancing Rawe di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar, Kecamatan keruak Kabupaten Lombok timur, Nusa Tenggara Barat (study kasus pelelangan ikan Hiu di TPI tanjung Luar)*. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan
- Darwis, V. 2004. *Faktor Penyebab Kemiskinan, Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga miskin Lahan Pesisir di Kabupaten Lamongan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.15 hal.
- Dirjen Perikanan. 1985. *Administrasi Pelabuhan Perikanan*. Direktorat Bina Prasarana Perikanan, Dirjen Perikanan. Jakarta.120 hal
- DKP Kab. Trenggalek. 2008. *Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, Trenggalek. 60 hal
- Engineer, A. 2007. *Islam dan Pembebasan*. LKiS.Yogyakarta. 155 hal
- Fakultas Perikanan UB. 2007. *Pedoman Penulisan Skripsi, PKL, PTA Dan Artikel Pada Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya*. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang. 54 hal.
- Hanafiah, A.M dan A.M Saefudin. 2006. *Tataniaga Hasil Perikanan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta 208 hal.
- Handoko, T. 1999. *Manajemen, Edisi 2*.BPFE. Yogyakarta. 412 hal.
- Huseini, Martini. 2007. *Masalah Dan Kebijakan Peningkatan Produk Perikanan Untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat*. dMakalah isampaikan pada seminar Nasional hari pangan sedunia di Jakarta, Kamis, 21 november 2007. 8 hal.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta 392 hal
- Kusnadi, 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Pondok Edukasi & Pokja Pembaharuan. Bantul. 110 hal
- Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, 2007. *Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor kep. 01/men/2007 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi*. Jakarta.32 hal
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntanssi*. Salemba Empat. Jakarta. 646 hal
- Nazir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 622 hal

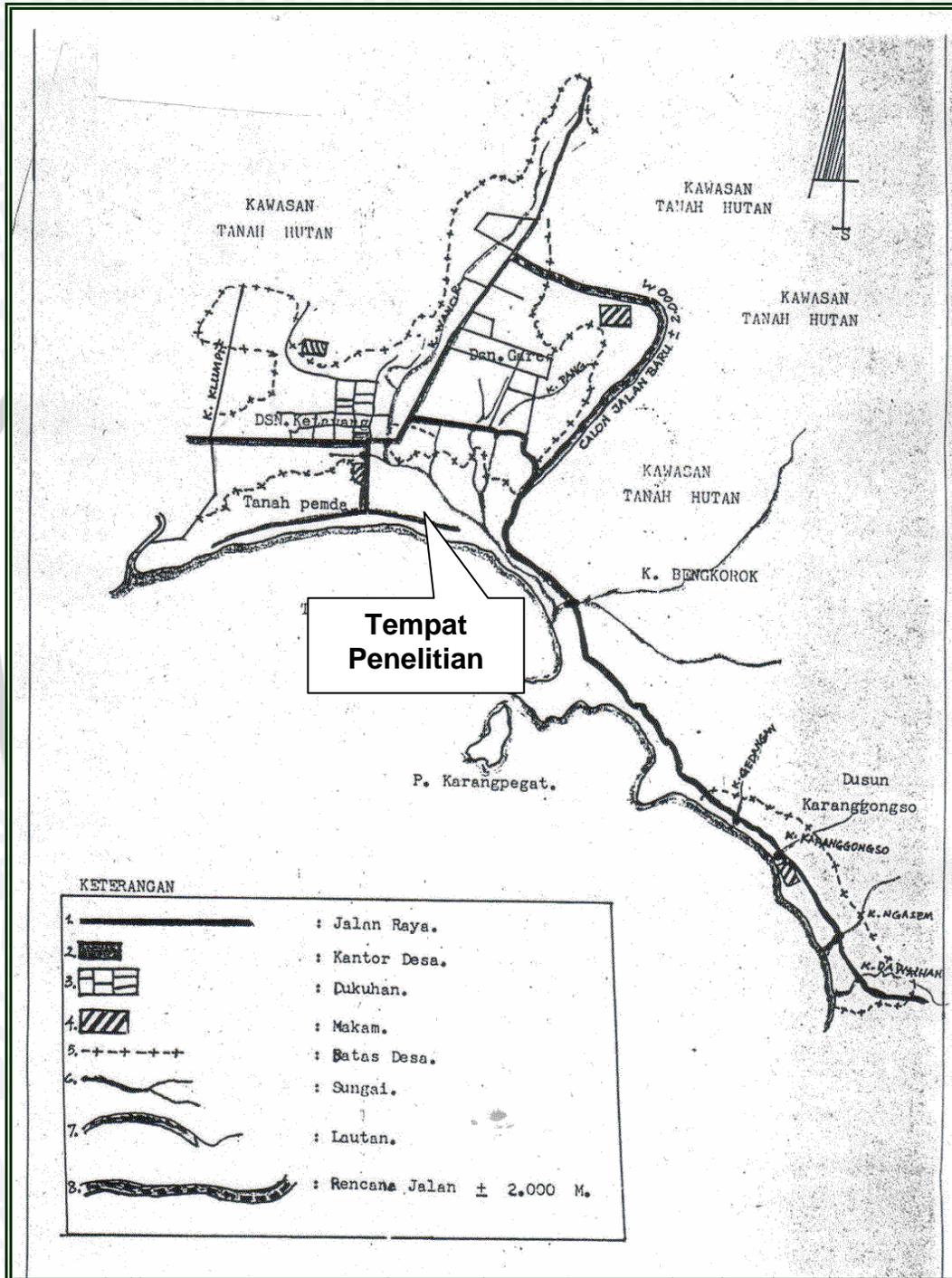
- Numbery, Freddy.2004. *Kebijakan dan Program Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional*. Makalah pada Dialog Nasional Kelautan dan Perikanan HIMAPIKANI di Universitas Muhammadiyah Malang. 11 hal.
- Pemda Kab. Trenggalek. 2002. *Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan*. Trenggalek. 13 hal.
- Pemda Kab. Trenggalek. 2003. *Kep. Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek*. Trenggalek. 14 hal.
- PPN Prigi. 2008. *Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2007*. Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek. 60 hal
- Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Third Edition : Microeconomic*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2000, page 348.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Yayasan Badan Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Setiawan, Qoid, A, Susilo,E, Harahab, N dan Riniwati H. 1993. *Peranan KUD/TPI dan Pedagang Ikan terhadap Usaha Penangkapan Ikan : Studi kasus dengan Pendekatan "Ketergantungan dan Inovasi"* di Pacitan, Jawa Timur. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya,. Malang.96 hal
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi suatu pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,.465 hal.
- Singarimbun, dkk. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. LP3ES. Jakarta. 336 hal
- Subani, W. dan H. R. Barus. 1989. *Alat Penangkapan Ikan dan Udang di Indonesia. Balai Penelitian Perikanan Laut*. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Perikanan. Jakarta. 96 hal
- Sudjana. 1996. *Metoda Statistika*. Tarsito. Bandung.508 hal
- Sukandar. 2006. *Diktat Manajemen Penangkapan Ikan*. Fakultas Peikanan. Universitas Brawijaya. Malang. 39 hal.
- Susilo, E. 1986. *Nelayan, di Antara tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan Suatu Analisa teoritik*. Makalah pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial di Ujung Pandang, 15-19 Desember 1986. 21 hal.
- Susilowati,T, Manadiyanto dan Nikijuluw, V. 1987. *Lembaga-lembaga Pemasaran Yang Membeli Hasil Tangkap Nelayan*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut No.43. 6 hal.

Lampiran 1. Peta Kabupaten Trenggalek



Skala 1 : 750.000

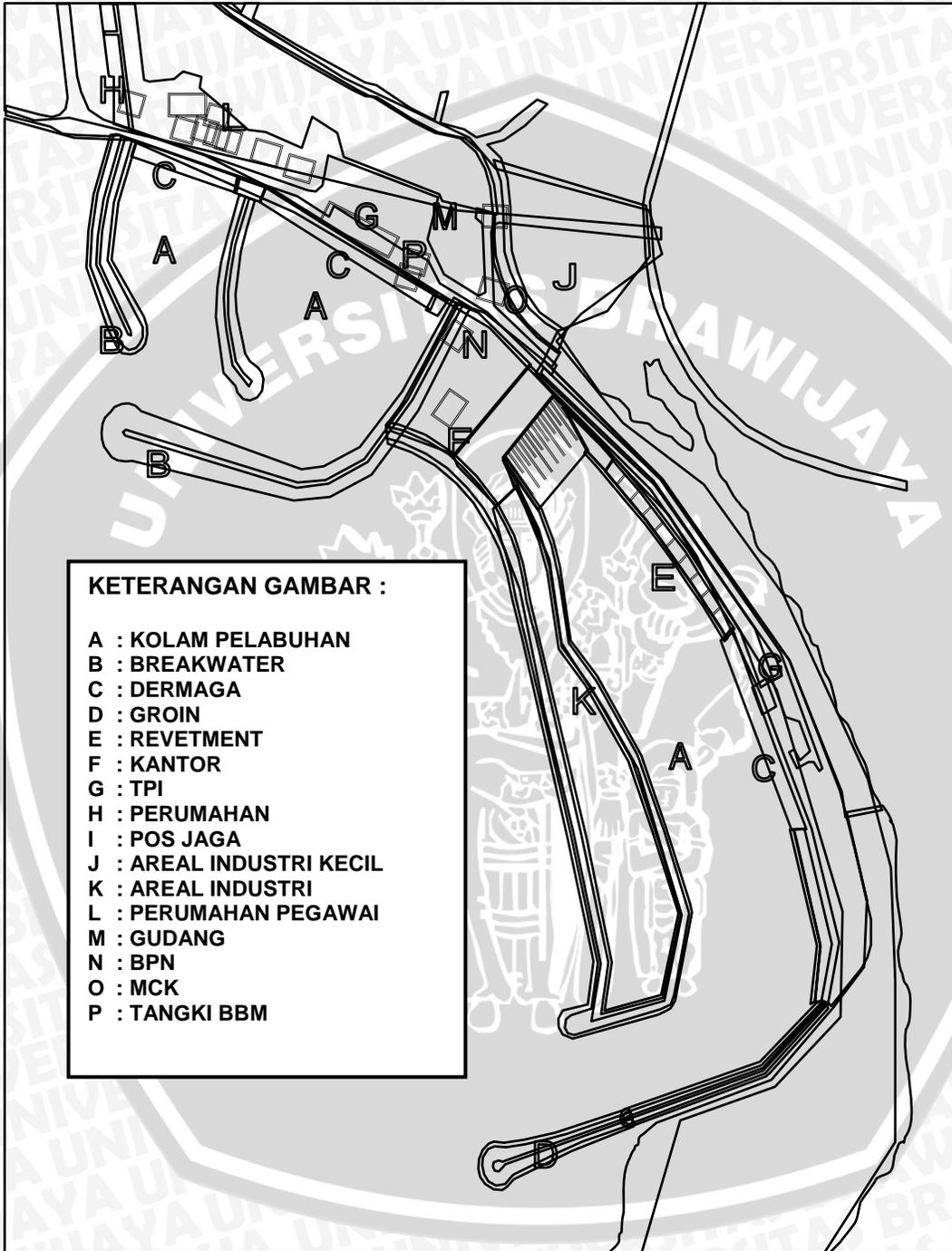
Lampiran 2. Denah lokasi penelitian di Perairan Prigi, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek



Sum

ber : Kantor Desa Tasikmadu, 2008

Lampiran 3. Lay Out Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



Sumber : Kantor PPN Prigi, 2008

Lampiran 4. Gedung Tempat Pelelangan



Gedung TPI I



Gedung TPI II



Lampiran 5 Aktivitas pelelangan ikan di TPI Prigi



Pendaratan hasil tangkapan nelayan



Pengangkutan ikan dari perahu ke TPI



Penimbangan Ikan



Proses pelelangan di TPI



Aktivitas tawar menawar harga ikan di TPI Prigi



Pengangkutan ikan keluar TPI

Lampiran 6

Tabel Perincian Besarnya Investasi Modal Tetap dan Nilai Penyusutan Masing-Masing Responden Pada Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Tahun 2008

Bentuk Biaya	Responden														
	1/Sinar			2/Mina Jaya			3/Arkanu			4/Nabila			5/Tirta Mina		
	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)
Kapal	200.000.000	10	20.000.000	150.000.000	10	15.000.000	200.000.000	10	20.000.000	200.000.000	10	20.000.000	200.000.000	10	20.000.000
Mesin Kapal :															
- Fuso	22.000.000	10	2.200.000	35.000.000	10	3.500.000	35.000.000	10	3.500.000	22.000.000	10	2.200.000	22.000.000	10	2.200.000
- Panther	12.000.000	10	1.200.000	0	10	0	20.000.000	10	2.000.000	12.000.000	10	1.200.000	12.000.000	10	1.200.000
- Suzuki	32.000.000	10	3.200.000	32.000.000	10	3.200.000	36.000.000	10	3.600.000	32.000.000	10	3.200.000	32.000.000	10	3.200.000
Jaring	60.000.000	5	12.000.000	92.000.000	5	18.400.000	70.000.000	5	14.000.000	70.000.000	5	14.000.000	64.000.000	5	12.800.000
Tali	1.500.000	5	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000	5	300.000
Jangkar	800.000	10	80.000	800.000	10	80.000	800.000	10	80.000	800.000	10	80.000	800.000	10	80.000
Jumlah	328.300.000	0	<b>38.980.000</b>	311.300.000	0	<b>40.480.000</b>	363.300.000	0	<b>43.480.000</b>	338.300.000	0	<b>40.980.000</b>	332.300.000	0	<b>39.780.000</b>
Total	: 203.700.000														
Rata-rata	: 40.740.000														

Sumber : Hasil Penelitian

Lampiran 7

**Tabel Perincian Besarnya Biaya Tidak Tetap Masing-Masing Responden Pada Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Bulan Juli 2008**

bentuk biaya	Responden														
	1/Sinar			2/Mina Jaya			3/Arkanu			4/Nabila			5/Tirta Mina		
	Jumlah	Harga/sat	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/sat	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/sat	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/sat	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/sat	Nilai (Rp)
Retribusi	0		150.000			500.000			300.000			400.000			200.000
Pemikul	33	5.000	165.350	205	5.000	1.025.000	95	5.000	475.000	133	5.000	666.667	95	5.000	475.000
BBM															
- Solar	4.000	5.000	20.000.000	3.200	5.000	16.000.000	4.000	5.000	20.000.000	4.000	5.000	20.000.000	3.600	5.000	18.000.000
- Bensin	1.200	6.000	7.200.000	1.667	6.000	10.002.000	1.200	6.000	7.200.000	1.200	6.000	7.200.000	1.000	6.000	6.000.000
- Oli	10	20.000	200.000	10	20.000	200.000	10	20.000	200.000	10	20.000	200.000	10	20.000	200.000
perawatan alat tangkap			500.000			6.000.000			500.000			0			0
perawatan kapal dan mesin			1.000.000			8.000.000						0			0
logistik	16	8.000	128.000	46	8.000	368.000	19	8.000	152.000	18	8.000	144.000	20	8.000	160.000
Jumlah			29.343.350			42.095.000			28.827.000			28.610.667			25.035.000
<b>Total</b>	: 153.911.017														
<b>Rata-rata</b>	: <b>30.782.203</b>														

Sumber : Hasil Penelitian

Lampiran 8

Tabel Perincian Besarnya Total Biaya Masing-Masing Responden Pada Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Bulan Juli 2008

Bentuk biaya (Rp)	1/Sinar	2/Mina Jaya	3/Arkanu	4/Nabila	5/Tirta Mina
• Penyusutan	38.980.000	40.480.000	43.480.000	40.980.000	39.780.000
• Iuran tambat labuh	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Jumlah biaya tetap setahun	39.055.000	40.555.000	43.555.000	41.055.000	39.855.000
<b>Biaya tetap per bulan</b>	<b>3.254.583</b>	<b>3.379.583</b>	<b>3.629.583</b>	<b>3.421.250</b>	<b>3.321.250</b>
<b>Biaya tidak tetap</b>	<b>29.343.350</b>	<b>42.095.000</b>	<b>28.827.000</b>	<b>28.610.667</b>	<b>25.035.000</b>
Jumlah	32.597.933	45.474.583	32.456.583	32.031.917	28.356.250
Total :	170.917.267				
<b>Rata-rata :</b>	<b>34.183.453</b>				

Sumber : Hasil Penelitian

Lampiran 9

Tabel Perincian Besarnya Total Produksi Masing-Masing Responden Pada Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Bulan Juli 2008

Jenis Ikan	Responden														
	1/Sinar			2/Mina Jaya			3/Arkanu			4/Nabila			5/Tirta Mina		
	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)
Tonkol	2.500	6.000	15.000.000	12.500	6.000	75.000.000	7.500	6.000	45.000.000	10.833	6.000	65.000.000	7.500	6.000	45.000.000
layang	807	4.000	3.228.000	8.000	4.000	32.000.000	2.000	4.000	8.000.000	2.500	4.000	10.000.000	1.000	4.000	4.000.000
Lemuru	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0	1.000	700	700.000
<b>Jumlah</b>			<b>18.228.000</b>			<b>107.000.000</b>			<b>53.000.000</b>			<b>75.000.000</b>			<b>49.700.000</b>
Total : 302.928.000 Rata-rata : 60.585.600															

Sumber : Hasil Penelitian

## Lampiran 10

Tabel Perincian Besarnya Biaya Operasional Dan Pendapatan Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi selama Bulan Juni 2008 (20 kali Trip)

Responden	Biaya Operasional	Esekan	Uang Njero	Totalan	Total Pendapatan
Aspari	200.000	500.000	200.000	0	500.000
Ilyas	300.000	2.000.000	1.000.000	200.000	2.900.000
Imam Nursalim	200.000	1.000.000	200.000	150.000	1.150.000
Mahmudianto	200.000	2.000.000	500.000	200.000	2.500.000
Maulan	300.000	800.000	200.000	250.000	950.000
Muji Laksono	400.000	2.000.000	500.000	200.000	2.300.000
Rizal Kaspari	400.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	5.600.000
Sodikun	200.000	1.000.000	200.000	100.000	1.100.000
Sukri Ghozali	400.000	3.000.000	1.000.000	200.000	3.800.000
Tasmil	200.000	1.000.000	200.000	100.000	1.100.000
Total	2.800.000	17.300.000	5.000.000	2.400.000	21.900.000
Rata-rata	280.000	1.730.000	500.000	240.000	2.190.000

Sumber : Hasil Penelitian

## Lampiran 11

**Tabel Perincian Besarnya Investasi Modal Tetap dan Nilai Penyusutan Masing-Masing Responden Pada Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Tahun 2008**

Jenis Modal Tetap	Responden														
	1/Partiyah			2/S.Khotijah			3/Dadang			4/Wiji			5/Suratin		
	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)
Terpal	-	-	-	-	-	-	300.000	0,5	600.000	300.000	0,5	600.000	600.000	0,5	1.200.000
Timbangan	-	-	-	-	-	-	100.000	5	20.000	300.000	5	60.000	400.000	5	80.000
Cold Box	-	-	-	-	-	-	4.600.000	1	4.600.000	18.400.000	1	18.400.000	23.000.000	1	23.000.000
Truck Mitsubishi	-	-	-	-	-	-	30.000.000	15	2.000.000	31.000.000	15	2.066.667	31.000.000	15	2.066.667
Jumlah	-	-	-	-	-	-	35.000.000		7.220.000	50.000.000		21.126.667	55.000.000		26.346.667
Penyusutan per bulan									601.667			1.760.556			2.195.556

Sumber : Hasil Penelitian

## Lampiran 12

**Tabel Perincian Harga Pembelian Dan Penjualan Rata-Rata Masing-Masing Responden Pada Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Bulan Juli 2008**

## a. Tabel Pembelian

Jenis Ikan	Responden														
	1/Partiyah			2/Siti Khotijah			3/Dadang			4/Wiji			5/Suratin		
	Jumlah (kg)	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah (kg)	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah (kg)	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah (kg)	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah (kg)	Harga/Kg	Nilai (Rp)
Tonkol	525	6.000	3.150.000	200	6.000	1.200.000	2.000	6.000	12.000.000	650	6.000	3.900.000	5.600	6.000	33.600.000
layang	30	4.000	120.000	23	4.000	92.000	2.000	4.000	8.000.000	5.000	4.000	20.000.000	1.000	4.000	4.000.000
Lemuru	25	700	17.500	100	700	70.000	1.500	700	1.050.000	5.000	700	3.500.000	1.500	700	1.050.000
<b>Jumlah</b>			<b>3.287.500</b>			<b>1.362.000</b>			<b>21.050.000</b>			<b>27.400.000</b>			<b>38.650.000</b>

## b. Tabel Penjualan

Jenis Ikan	Responden														
	1/Partiyah			2/Siti Khotijah			3/Dadang			4/Wiji			5/Suratin		
	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga/Kg	Nilai (Rp)
Tonkol	525	7.000	3.675.000	200	7.000	1.400.000	2.000	9.000	18.000.000	650	10.000	6.500.000	5.600	12.000	67.200.000
layang	30	5.000	150.000	23	5.000	115.000	2.000	6.000	12.000.000	5.000	7.000	35.000.000	1.000	7.000	7.000.000
Lemuru	25	1.000	25.000	100	1.000	100.000	1.500	2.500	3.750.000	5.000	2.500	12.500.000	1.500	2.500	3.750.000
<b>Jumlah</b>			<b>3.850.000</b>			<b>1.615.000</b>			<b>33.750.000</b>			<b>54.000.000</b>			<b>77.950.000</b>

## Lampiran 13

Tabel Perincian Biaya Tetap dan Tidak Tetap Masing-Masing Responden Pada Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Purse Seine Di Pantai Prigi Pada Bulan Juli 2008

Bentuk Biaya Tetap	Responden				
	1/Partiyah	2/S.Khotijah	3/Dadang	4/Wiji	5/Suratin
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Penyusutan	-	-	601.667	1.760.556	2.195.556
Pajak kendaraan	-	-	75000	80000	80000
<b>Jumlah biaya tetap</b>	-	-	<b>676.667</b>	<b>1.840.556</b>	<b>2.275.556</b>

Bentuk Biaya Tidak Tetap	Responden				
	1/Partiyah	2/S.Khotijah	3/Dadang	4/Wiji	5/Suratin
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
BBM	-	-	200.000	300.000	350.000
Tenaga Kerja	29.000	16.150	750.000	3.500.000	5.000.000
Retribusi	-	-	50.000	200.000	250.000
Pembelian ikan	3.287.500	1.362.000	21.050.000	27.400.000	38.650.000
<b>Jumlah Biaya Tidak Tetap</b>	<b>3.316.500</b>	<b>1.378.150</b>	<b>22.050.000</b>	<b>31.400.000</b>	<b>44.250.000</b>
<b>Total Biaya</b>	<b>3.316.500</b>	<b>1.378.150</b>	<b>22.726.667</b>	<b>33.240.556</b>	<b>46.525.556</b>
Total	: 107.187.428				
Rata-rata	: 21.437.486				

Sumber : Hasil Penelitian

## Lampiran 14

## Jenis-Jenis Ikan Yang Dilelang Di TPI Prigi Pada Bulan Juli Tahun 2008

No	Jenis Ikan	Harga Ikan/Kg (Rp)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Kwee	-	-	-
2	Cakalang	4.454	45.017	200.520.000
3	Tongkol	3.587	460.815	1.652.958.000
4	Tuna	6.000	735	4.410.000
5	Kembung	-	-	-
6	Peperek	1.705	16.300	27.795.000
7	Ekor Merah	-	-	-
8	Layang	2.326	145.347	338.070.000
9	Lemuru	713	832.330	593.270.000
10	Cucut	-	-	-
11	Pari	-	-	-
12	Julung-julung	-	-	-
13	Slengseng	-	-	-
14	Layur	1.486	37.512	55.746.000
15	Ikan Terbang	-	-	-
16	Udang	-	-	-
17	Ubur-ubur	-	-	-
18	Abon	-	-	-
19	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah		1.538.056	2.872.769.000

Sumber : Laporan Perolehan Retribusi TPI Prigi, 2008